

SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENATAAN RUANG WILAYAH TENGAH

BUKU PROFIL PENATAAN RUANG PROPINSI DKI JAKARTA 2003



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH TENGAH

KATA PENGANTAR

Buku Profil Penataan Ruang Propinsi DKI Jakarta ini disusun dalam penyusunan sistem informasi dan dokumentasi yang pada dasarnya merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi penataan ruang daerah. Kegiatan itu sendiri ditujukan untuk melengkapi Direktorat Jenderal Penataan Ruang, khususnya Direktorat Penataan Ruang Wilayah Tengah dengan data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun program dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Teknis dan bantuan Teknis kepada daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten dan kota,

Dalam buku profil penataan ruang ini disampaikan informasi mengenai keadaan tata ruang dan pelaksanaan penataan ruang di daerah. Dimana melalui informasi ini dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan tata ruang apa yang dihadapi oleh daerah dan program tata ruang seperti apa yang sebaiknya diberikan. Melengkapi informasi ini juga dilampirkan data masukan elementer yang dapat dipergunakan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang oleh daerah terkait. Data tersebut terdiri dari 3 tahun data, yaitu 1995, 2000 dan 2003, dan disusun dalam bentuk basis data spasial dengan format MapInfo.

Penggunaan software MapInfo didasarkan pada pertimbangan bahwa pada saat sekarang ini software GIS yang paling banyak digunakan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Departemen Kimpraswil adalah MapInfo. Selain itu data MapInfo sangat mudah untuk ditransfer ke berbagai sistem Software lainnya.

Buku profil ini memang masih jauh dari sempurna dan diharapkan akan dapat terus diperbaharui sehingga informasi di dalamnya akan tetap *up to date*.

Jakarta, Desember 2003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR PETA	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi

BAB I GAMBARAN UMUM WILAYAH

1.1 Kondisi Geografis.....	1
1.1.1 Letak dan Kedudukan	1
1.1.2 Administrasi dan Luas Lahan	1
1.1.3 Penggunaan Lahan.....	4
1.1.4 Iklim dan Suhu Udara	4
1.1.5 Kondisi Hidrologi	4
1.2 Kependudukan dan Sosial.....	5
1.2.1 Jumlah, Pertumbuhan, dan kepadatan Penduduk	5
1.2.2 Jumlah Penduduk Menurut Rasio Jenis Kelamin.....	6
1.2.3 Kesempatan Kerja	6
1.3 Sumberdaya Buatan.....	7
1.4 Perekonomian	7
1.4.1 PDRB Propinsi DKI Jakarta menurut Harga Berlaku.....	7
1.4.2 PDRB DKI Jakarta menurut Harga Konstan	7
1.4.3 Distribusi PDRB DKI Jakarta	8

BAB 2 PROFIL PENATAAN RUANG

2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah	9
2.1.1 Arahan Pengelolaan Kawasan Hijau Lindung	9
2.1.2 Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman	10

2.1.3	Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Ekonomi Prospektif	10	3.2	Permasalahan	37
2.1.4	Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pusat Kegiatan	12	3.2.1	Alternatif Kebijakan Pemerintah	37
2.1.5	Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah	12	3.2.2	Kebijakan untuk Bidang Penataan Ruang	37
2.1.6	Pengembangan prasarana sumber air dan air bersih bagi masyarakat	12	3.2.3	Bidang Prasarana Wilayah	37
2.1.7	Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas	15	3.2.4	Bidang Perkotaan & Perdesaan	38
2.1.8	Arahan Kebijakan Tata Guna Air, Tata Guna Laut, Tata Guna Udara, dan Tata Guna Ruang Bawah Tanah	15	3.2.5	Bidang Perumahan & Permukiman	38
2.2	Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Kotamadya	17	3.2.6	Bidang Sumberdaya Air	38
2.2.1	Kawasan Hijau Lindung	17			
2.2.2	Kawasan Hijau Binaan	19			
2.2.3	Kawasan Permukiman	20			
2.2.4	Pemanfaatan Ruang Kawasan Industri dan Pergudangan	22			
2.2.5	Pemanfaatan Ruang Sistem Pusat Kegiatan	23			
2.2.6	Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah	24			
2.2.7	Air Bersih	26			
2.2.8	Pengembangan Prasarana dan Sarana Tata Air dan Pengendalian Banjir	28			
2.2.9	Pengembangan sektor Listrik, Gas, Telekomunikasi	29			
2.2.10	Pengembangan Kawasan Prioritas	30			
2.3	Status Rencana Tata Ruang Wilayah Kota di DKI Jakarta	31			
2.3.1	RTRW Kota-kota Jakarta	31			
2.3.2	RTRW Kabupaten Kepulauan Seribu	31			

BAB 3 POTENSI PERMASALAHAN DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

3.1	Potensi	35
3.1.1	Letak Strategis	35
3.1.2	Ekonomi	36
3.1.3	Potensi Wilayah	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk di DKI Jakarta Tahun 2001	4
Tabel 1.2	Luas Lahan dan Penggunaannya Menurut Kota Tahun 2001	4
Tabel 1.3	Nama dan Panjang Sungai/Saluran/Kanal di DKI Jakarta	4
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk di DKI Jakarta Tahun 2001	5
Tabel 1.5	Jumlah dan Laju Penduduk di DKI Jakarta Tahun 2001	5
Tabel 1.6	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2001	6
Tabel 1.7	Jumlah Penduduk Menurut Jumlah dan Sex Ratio di DKI Jakarta Tahun 2001.....	6
Tabel 1.8	Penduduk Umur 10 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan di DKI Jakarta 2001	6
Tabel 1.9	Panjang dan Luas Jalan Menurut Jenis Jalan	7
Tabel 1.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 - 2000 (Juta Rupiah).....	7
Tabel 1.11	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 - 2000 (Juta Rupiah).....	8
Tabel 1.12	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 - 2000	8
Tabel 2.1	Status RTRW Kota-kota dan Kabupaten di Propinsi DKI	31

DAFTAR PETA

1.	Peta Orientasi Propinsi DKI Jakarta.....	2
2.	Peta Administrasi Propinsi DKI Jakarta	3
3.	Peta Arahana Kepadatan Penduduk Tahun 2010	11
4.	Peta Arahana Pengembangan Kawasan Ekonomi Prospektif	13
5.	Peta Struktur Ruang Wilayah DKI Jakarta.....	20
6.	Peta Arahana Pengembangan Kawasan Hijau.....	23
7.	Peta Masalah Tata Ruang Propinsi DKI Jakarta	38
8.	Peta Program Tata Ruang Propinsi DKI Jakarta	40
9.	Peta Kegiatan Bantek di Propinsi DKI Jakarta	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data Penataan Ruang Tahun 1995

Lampiran II Data Penataan Ruang Tahun 2003

Letak Kota Jakarta berada di posisi $6^{\circ} 12'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 48'$ Bujur Timur, dengan luas Wilayah DKI Jakarta untuk daratan $661,52 \text{ km}^2$ dan berupa lautan seluas $6.977,5 \text{ Km}^2$, dengan jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2001 berjumlah 7.423.379 jiwa.

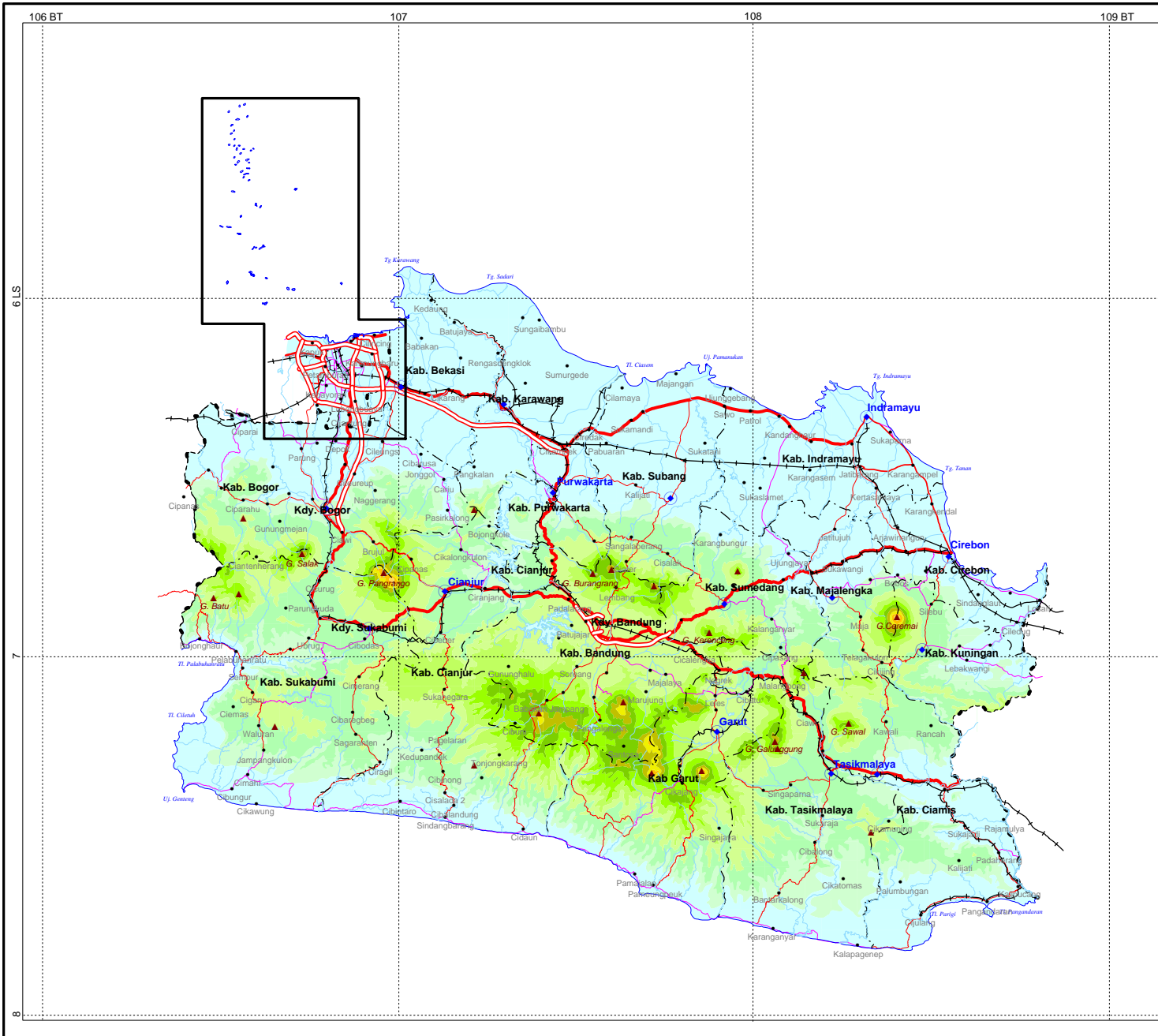
1.1 KONDISI GEOGRAFIS

1.1.1 LETAK DAN KEDUDUKAN

Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi $6^{\circ} 12'$ LS dan $106^{\circ} 48'$ Bujur Timur. Luas wilayah Propinsi DKI Jakarta berdasarkan SK. Gubernur Nomor 1227 tahun 1989 adalah berupa daratan seluas $661,52 \text{ km}^2$ dan berupa lautan seluas $6.977,5 \text{ km}^2$, terdapat tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Di sebelah utara membentang pantai barat sampai timur sepanjang 35 km yang menjadi tempat bermuaranya 9 buah sungai dan 2 buah kanal, sementara sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Propinsi Jawa Barat, sebelah barat dengan Propinsi Banten sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa (lihat peta).

1.1.2 ADMINISTRASI DAN LUAS LAHAN

Administarasi Propinsi DKI Jakarta terbagi lima kota yaitu Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Jumlah kecamatan di Propinsi DKI Jakarta berjumlah 43 kecamatan dan terbagi menjadi 265 kelurahan.



PETA ORIENTASI PROPINSI DKI JAKARTA



Legenda :

- Wilayah Administratif DKI Jakarta

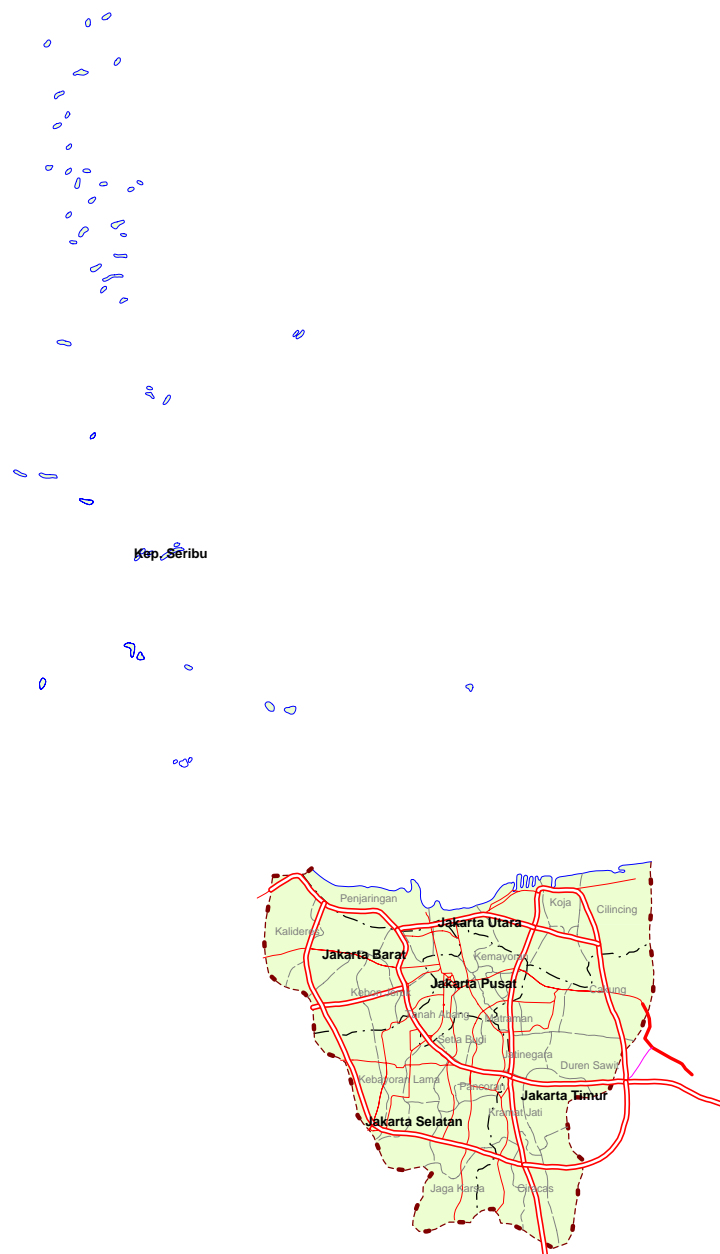
Peta Dasar	
Tema	
Tipe	
Nama File	

PETA ADMINISTRATIF PROPINSI DKI JAKARTA



Legenda :

- Ibukota Propinsi
- Ibukota kabupaten/kota
- Pusat Kecamatan
- Sungai
- Batas Propinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor 1
- Jalan Kolektor 2
- Jalan Kolektor 3
- Rel KA



Peta Dasar	1. Peta Rapport 1:250.000, Bakosurtanal
Tema	Data Potensi desa tahun 2003, BPS
Nama File	Peta Administratif.WOR

DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH TENGAH

Luas lahan Propinsi DKI Jakarta 66.152 Ha. Kota yang paling luas adalah Jakarta Timur dengan luas 18.773 Ha (28,38%), sedangkan luas administrasi kota yang paling kecil adalah Jakarta Pusat 4.790 ha (7,24% dari luas total Propinsi).

Tabel 1.1 Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk di DKI Jakarta Tahun 2001

No	Kota	Luas (Km2)
01.	Jakarta Selatan	145.73
02.	Jakarta Timur	187.73
03.	Jakarta Pusat	47.90
04.	Jakarta Barat	126.15
05.	Jakarta Utara	154.01
Jumlah		661.52

1.1.3 PENGGUNAAN LAHAN

Penggunaan lahan di Propinsi DKI Jakarta terdiri dari perumahan (43.680,66 ha), industri (3.733,49 ha), perkantoran dan pergudangan (6.902,03 ha), taman (1.186,97 ha), dan lain-lain (10.648,78 ha). Jumlah luas kawasan perumahan berada di Kota Jakarta Timur, Industri berada di Jakarta Utara, perkantoran dan pergudangan Jakarta Selatan, Taman berada di Jakarta Utara.

Tabel 1.2 Luas Lahan dan Penggunaannya Menurut Kota Tahun 2001

Kota	Perumahan	Industri	Perkant. Pergud.	Taman	Lainnya	Luas Tanah
Jakarta Selatan	10,431.35	236.08	1,568.05	179.24	2,158.26	14,573
Jakarta Timur	13,445.22	1,233.38	1,473.68	277.84	2,342.87	18,773
Jakarta Pusat	3,097.69	54.13	971.41	138.91	527.85	4,790

Kota	Perumahan	Industri	Perkant. Pergud.	Taman	Lainnya	Luas Tanah
Jakarta Barat	8,559.27	495.77	1,451.98	127.41	1,980.55	12,615
Jakarta Utara	8,147.13	1,714.13	1,436.91	463.57	3,639.25	15,401
DKI Jakarta	43,680.66	3,733.49	6,902.03	1,186.97	10,648.78	66,152

1.1.4 IKLIM DAN SUHU UDARA

Keadaan iklim kota Jakarta secara umum beriklim panas dengan suhu maksimum udara berkisar 30,8⁰ C pada siang hari dan suhu minimum udara berkisar 26,1⁰ pada malam hari. Sementara curah hujan sepanjang tahun 2001 mencapai 1.599 mm dengan tingkat kelembaban udara mencapai 77,1 % dan kecepatan angin rata-rata mencapai 2,8 m/detik.

1.1.5 KONDISI HIDROLOGI

Kondisi hidrologi untuk air permukaan yaitu sungai terdapat sekitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan. Sedangkan daerah di sebelah selatan dan timur Jakarta terdapat rawa/situ dengan total luas mencapai 96,5 Ha. Kedua wilayah ini cocok digunakan sebagai daerah resapan air, dengan iklimnya yang lebih sejuk sehingga ideal dikembangkan sebagai wilayah penduduk.

Tabel 1.3 Nama dan Panjang Sungai/Saluran/Kanal di DKI Jakarta

No	Sungai/ Kanal	Panjang	Luas	Peruntukan Sungai
1	Ciliwung	46,200	1,155,000	Usaha Perkotaan
2	Krukut	28,750	172,500	Air Baku Minum
3	Mookervart	7,300	233,600	Air Baku Minum
4	Kali Angke	12,810	538,020	Usaha Perkotaan
5	Kali Pesanggrahan	27,300	351,900	Perikanan
6	Sungai Grogol	23,600	165,200	Perikanan

No	Sungai/ Kanal	Panjang	Luas	Peruntukan Sungai
7	Kali Cideng	17,800	248,810	Usaha Perkotaan
8	Kalibaru Makmur			Usaha Perkotaan
9	Cipinang	27,350	464,950	Usaha Perkotaan
10	Sunter	37,250	1,080,250	Usaha Perkotaan
11	Cakung	20,700	414,000	Usaha Perkotaan
12	Buaran	7,900	158,000	Usaha Perkotaan
13	Kalibaru			Air Baku Minum
14	Cengkareng Drain	7,600	380,000	Usaha Perkotaan
15	Jati Kramat	3,800	19,000	Usaha Perkotaan
16	Cakung Drain	11,200	672,000	Usaha Perkotaan
17	Ancol	8,300	240,700	Perikanan
18	Banjir Kanal			

1.2 KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL

Jumlah penduduk DKI Jakarta berdasarkan hasil registrasi penduduk pertengahan tahun 2001 tercatat sebanyak 7,42 juta jiwa. Dengan jumlah luas dan jumlah penduduk tersebut Propinsi DKI Jakarta merupakan propinsi yang terpadat di Indonesia. Pertumbuhan Penduduk Jakarta secara keseluruhan mengalami penurunan, akan tetapi jumlah pendatang tetap cenderung besar sehingga tidak banyak berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang terlanjur banyak dan padat.

1.2.1 JUMLAH, PERTUMBUHAN, DAN KEPADATAN PENDUDUK

Jumlah penduduk DKI Jakarta menurut sensus penduduk tahun 2001 berjumlah 7.423.379 jiwa. Kota Jakarta Timur merupakan wilayah terpadat di Propinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk di DKI Jakarta Tahun 2001

No	Kota	Penduduk
01.	Jakarta Selatan	1,674,780
02.	Jakarta Timur	2,061,911
03.	Jakarta Pusat	929,259
04.	Jakarta Barat	1,565,420
05.	Jakarta Utara	1,192,009
Jumlah		7,423,379

Menurut sensus penduduk tahun 2001 laju pertumbuhan penduduk Propinsi DKI Jakarta dari kurun waktu 1990/2000 mengalami peningkatan sebesar 0,16 %. Laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak berarti semua kota yang ada di propinsi ini mengalami kenaikan seperti Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat malah mengalami penurunan dari laju rata-rata propinsi.

Tabel 1.5 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di DKI Jakarta Tahun 2001

No	Kota	Sensus Penduduk			Laju Pertumbuhan	
		1980	1990	2000	1980/1990	1990/2000
01.	Jakarta Selatan	1,582,194	1,913,084	1,789,006	1.92	-0.69
02.	Jakarta Timur	1,460,068	2,067,222	2,353,023	3.54	1.35
03.	Jakarta Pusat	1,245,030	1,086,568	893,198	-1.35	-2.01
04.	Jakarta Barat	1,234,885	1,822,762	1,906,385	3.97	0.46
05.	Jakarta Utara	981,272	1,369,630	1,444,027	3.39	0.55
Jumlah		6,503,449	8,259,266	8,385,639	2.42	0.16

Jumlah penduduk Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2001 sebesar 7.423.379 jiwa, sedangkan untuk kepadatan penduduk Propinsi DKI Jakarta sebesar 11,22 jiwa/km². Kota yang memiliki kepadatan di atas kepadatan Propinsi DKI Jakarta adalah Kota Jakarta Pusat dengan kepadatan 19.400 jiwa/km², Jakarta Barat 12.409 jiwa/km², Jakarta Selatan 11.492 jiwa/km², sedangkan kota lainnya masih dibawah rata-rata (lihat peta kepadatan penduduk DKI).

Tabel 1.6 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di DKI Jakarta Tahun 2001

No	Kota	Luas (Km ²)	Penduduk	Kepadatan Penduduk
01.	Jakarta Selatan	145.73	1,674,780	11,492
02.	Jakarta Timur	187.73	2,061,911	10,983
03.	Jakarta Pusat	47.90	929,259	19,400
04.	Jakarta Barat	126.15	1,565,420	12,409
05.	Jakarta Utara	154.01	1,192,009	7,740
Jumlah		661.52	7,423,379	11,222

1.2.2 JUMLAH PENDUDUK MENURUT RASIO JENIS KELAMIN

Jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 7.423.379 jiwa terdiri dari laki-laki 3.840.170 jiwa dan untuk perempuan 3.583.209 jiwa. Sex rasio penduduk Propinsi DKI yaitu 1.07 yang artinya dari 1000 jumlah penduduk perempuan terdapat 1.070 jumlah penduduk laki-laki. Kota dengan rasio diatas rata-rata yaitu Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, sedangkan kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara rasio penduduknya dibawah rata-rata.

Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Jumlah dan Sex Ratio di DKI Jakarta Tahun 2001

No	Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
01.	Jakarta Selatan	877,203	797,577	1,674,780	1.10
02.	Jakarta Timur	1,096,217	965,694	2,061,911	1.14
03.	Jakarta Pusat	466,027	463,232	929,259	1.01
04.	Jakarta Barat	790,549	774,871	1,565,420	1.02
05.	Jakarta Utara	610,174	581,835	1,192,009	1.05
Jumlah		3,840,170	3,583,209	7,423,379	1.07

1.2.3 KESEMPATAN KERJA

Jumlah angkatan kerja di Propinsi DKI Jakarta sebesar 7.048.910 jiwa. Jumlah penduduk angkatan kerja ini terdiri dari yang bekerja, mencari pekerjaan, sekolah, rumah tangga, dan lainnya. Jumlah penduduk yang bekerja berjumlah 3.506.377 jiwa; mencari pekerjaan 342.487 jiwa; sekolah 1.383.349; rumah tangga 1.468.590 jiwa; dan lainnya 348.107 jiwa. Komposisi angkatan kerja yang berjumlah paling banyak dengan usia kerja antara 1.017.108 jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja yang bekerja mayoritas usia 25 -29 tahun.

Tabel 1.8 Penduduk Umur 10 Tahun ke atas Menurut Golongan Umur dan Jenis Kegiatan di DKI Jakarta 2001

Kelompok Umur	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Sekolah	Rumah T.	Lainnya	Jumlah
10 - 14	15,544	3,491	642,752	5,329	16,020	683,136
15 - 19	218,359	63,850	569,525	42,456	43,764	937,954
20 - 24	514,428	152,968	161,563	138,946	49,203	1,017,108
25 - 29	639,313	59,334	8,555	247,709	25,988	980,899
30 - 34	547,652	28,740	477	206,088	15,733	798,690
35 - 39	442,665	13,920	477	195,921	5,946	658,929
40 - 44	361,915	7,149	-	159,074	6,191	534,329
45 - 49	303,813	5,066	-	127,123	7,629	443,631
50 - 54	225,869	3,508	-	110,479	13,254	353,110
55 - 59	118,705	2,402	-	84,863	36,055	242,025
60 - 64	68,214	1,177	-	65,413	39,649	174,453
65 +	49,900	882	-	85,189	88,675	224,646
Jumlah	3,506,377	342,487	1,383,349	1,468,590	348,107	7,048,910

1.3 SUMBERDAYA BUATAN

Panjang jalan secara keseluruhan di Propinsi DKI Jakarta sepanjang 6.528.481 m. Panjang jalan tol di Propinsi DKI Jakarta untuk tahun 2001 yaitu 112.960 m; jalan negara 153.500 m; jalan propinsi 1.325.093 m; kotamadya 4.936.928 m. Luas jalan Propinsi DKI Jakarta seluas 41.527.055 M², sedangkan rinciannya adalah sebagai berikut untuk jalan tol 2.472.680; jalan negara 2.811.425; propinsi 15.254.846; kotamadya 20.988.104.

Tabel 1.9 Panjang dan Luas Jalan Menurut Jenis Jalan

Kotamadya	Jenis Jalan					
	Tol	Negara	Propinsi	Kotamadya	Jumlah	
A.	Panjang Jalan					
	1. Jakarta Selatan	21.884	50.24	312.087	1.273.686	1.657.897
	2. Jakarta Timur	37.222	31.458	334.223	1.057.955	1.460.858
	3. Jakarta Pusat	6.38	13.287	231.134	628.877	879.678
	4. Jakarta Barat	12.882	29.075	254.251	1.026.654	1.322.862
	5. Jakarta Utara	34.592	29.44	1936.348	949.756	1.207.186
	Jumlah	112.960	153.500	1.325.093	4.936.928	6.528.481
B.	Luas Jalan					
	1. Jakarta Selatan	430.512	801.088	3.492.546	5.471.446	10.195.592
	2. Jakarta Timur	997.736	694.468	3.784.543	4.511.563	9.988.310
	3. Jakarta Pusat	114.84	330.745	3.595.501	2.602.566	6.643.652
	4. Jakarta Barat	231.876	464.404	2.405.642	4.372.373	7.474.295
	5. Jakarta Utara	697.716	520.72	1.976.614	4.030.156	7.225.206
	Jumlah	2.472.680	2.811.425	15.254.846	20.988.104	41.527.055

1.4 PEREKONOMIAN

1.4.1 PDRB PROPINSI DKI JAKARTA MENURUT HARGA BERLAKU

Produk domestik regional bruto Propinsi DKI Jakarta mulai dari tahun 1997 sampai tahun 2000 mengalami kenaikan terutama untuk tahun 1999 sebesar 43,36%. Sedangkan dalam kontribusinya sektor yang memberikan paling besar untuk ekonomi Jakarta pada tahun 2000 adalah perdagangan, hotel, dan restoran (51,2 triliun rupiah); keuangan persewaan dan jasa perusahaan (49,86 triliun rupiah).

Tabel 1.10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 - 2000 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	1999		2000	
01.	Pertanian	377,590	28.74	472,392	10.99
02.	Industri Pengolahan	38,409,234	31.57	49,299,787	13.06
03.	Listrik, Gas, dan Air Minum	2,077,736	20.24	2,703,354	13.82
04.	Bangunan	19,645,532	28.74	27,132,260	19.11
05.	Perdagangan, Hotel, dan Rest.	38,808,975	18.17	51,186,639	12.87
06.	Pengangkutan dan Komunikasi	11,901,439	28.55	17,006,689	14.63
07.	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	36,582,906	-1,52	49,857,289	17.71
08.	Jasa-jasa servis	16,505,630	28.52	22,197,012	14.86
PDRB		164,309,042	18.58	219,855,422	15.07

1.4.2 PDRB DKI JAKARTA MENURUT HARGA KONSTAN

Produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tahun 1993 untuk tahun 1997 mengalami kenaikan sebesar 5,11%; tahun 1998 (-17,49%); untuk tahun 1999 mengalami kenaikan menjadi (-0,29 %); dan juga tahun 2000(3,64%). Pada tahun 1998 sektor yang mengalami penurunan sangat tajam yaitu sektor bangunan dengan penurunan mencapai - 38,29 %,

sedangkan untuk tahun 2000 yang sektor mengalami peningkatan paling besar yaitu pada sektor pengangkutan dan komunikasi.

Tabel 1.11 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 - 2000 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	1999		2000	
01.	Pertanian	116,867	11.33	115,742	-2,02
02.	Industri Pengolahan	12,391,061	2.63	12,875,191	3.46
03.	Listrik, Gas, dan Air Minum	1,161,177	5.25	1,245,846	4.09
04.	Bangunan	6,404,740	-2,80	6,535,392	1.59
05.	Perdagangan, Hotel, dan Rest.	13,550,295	0.62	14,166,037	4.47
06.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,402,572	2.17	5,736,012	5.43
07.	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	12,681,994	-6,17	13,285,022	3.43
08.	Jasa-jasa servis	5,506,518	5.09	5,735,176	3.02
PDRB		57,215,224	-0,29	59,694,418	3.64

1.4.3 DISTRIBUSI PDRB DKI JAKARTA

Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha untuk kurun waktu 1997 - 2000 mengalami fluktuasi, seperti sektor pertanian; listrik, gas, dan air minum, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan, dan jasa perusahaan mengalami penurunan, sedangkan untuk sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran, jasa-jasa servis mengalami kenaikan.

Tabel 1.12 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 - 2000 (Persentase)

No.	Lapangan Usaha	1997	1998	1999	2000
01.	Pertanian	0.19	0.21	0.20	0.21
02.	Industri Pengolahan	20.27	21.07	22.97	22.42

03.	Listrik, Gas, dan Air Minum	1.59	1.25	1.25	1.23
04.	Bangunan	15.19	11.01	12.38	12.34
05.	Perdagangan, Hotel, dan Rest.	21.27	23.70	23.17	23.28
06.	Pengangkutan dan Komunikasi	8.19	6.68	7.22	7.74
07.	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	23.60	26.81	22.78	22.68
08.	Jasa-jasa servis	9.70	9.27	10.03	10.10
PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00

Profil penataan ruang Propinsi DKI Jakarta secara umum dapat dikaji dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kawasan fungsional DKI Jakarta.

2.1 RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta diwujudkan dalam Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi, dan pemanfaatan ruang di masing-masing kotamadya di DKI Jakarta.

2.1.1 ARAHAN PENGELOLAAN KAWASAN HIJAU LINDUNG

Pengelolaan kawasan hijau lindung dan pemanfaatannya diarahkan untuk wilayah-wilayah, yaitu :

1. Pulau-pulau dan perairan laut yang ada di wilayah Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu;
2. Pulau Rambut, Pulau Bokor, dan Kecamatan Kepulauan Seribu;
3. Hutan Lindung Angke/Kapuk (lihat peta).

2.1.2 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERMUKIMAN

Arahan pemanfaatan ruang kawasan permukiman diarahkan untuk :

1. Kawasan permukiman, yaitu :
 - ✓ Untuk pembangunan baru siap bangun;
 - ✓ Pemugaran terhadap bangunan dan lingkungan perumahan bersejarah atau berciri khas budaya tertentu;
 - ✓ Pemeliharaan lingkungan perumahan terhadap kawasan yang sudah mantap;
 - ✓ Perbaikan lingkungan terhadap kawasan perumahan kumuh kategori ringan;
 - ✓ Peremajaan terhadap kawasan perumahan kumuh kategori sedang dan berat dengan membangun Rumah Susun Murah/Sederhana.
2. Pembangunan rumah susun murah/ederhana yang dikaitkan dengan peremajaan pada kawasan perumahan kumuh kategori sedang dan berat, diprioritaskan pada kawasan yang terletak disekitar jalan lingkar dalam serta yang berada di bagian lingkar luar yang memiliki akses tinggi terhadap jaringan jalan arteri tersebut, serta pada kawasan perumahan yang terletak berdekatan atau berada di dalam kawasan ekonomi prospektif.
3. Pembangunan perumahan pada kawasan konservasi atau kawasan resapan air dibatasi dengan kepadatan rendah disertai upaya mempertahankan fungsi resapan air, khususnya kawasan di sebelah selatan jalan lingkar luar.
4. Perubahan fungsi pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan yang telah mantap, dan memiliki nilai sejarah, budaya serta arsitektur khas,

seperti kawasan Menteng dan Kebayoran Baru dikendalikan secara khusus.

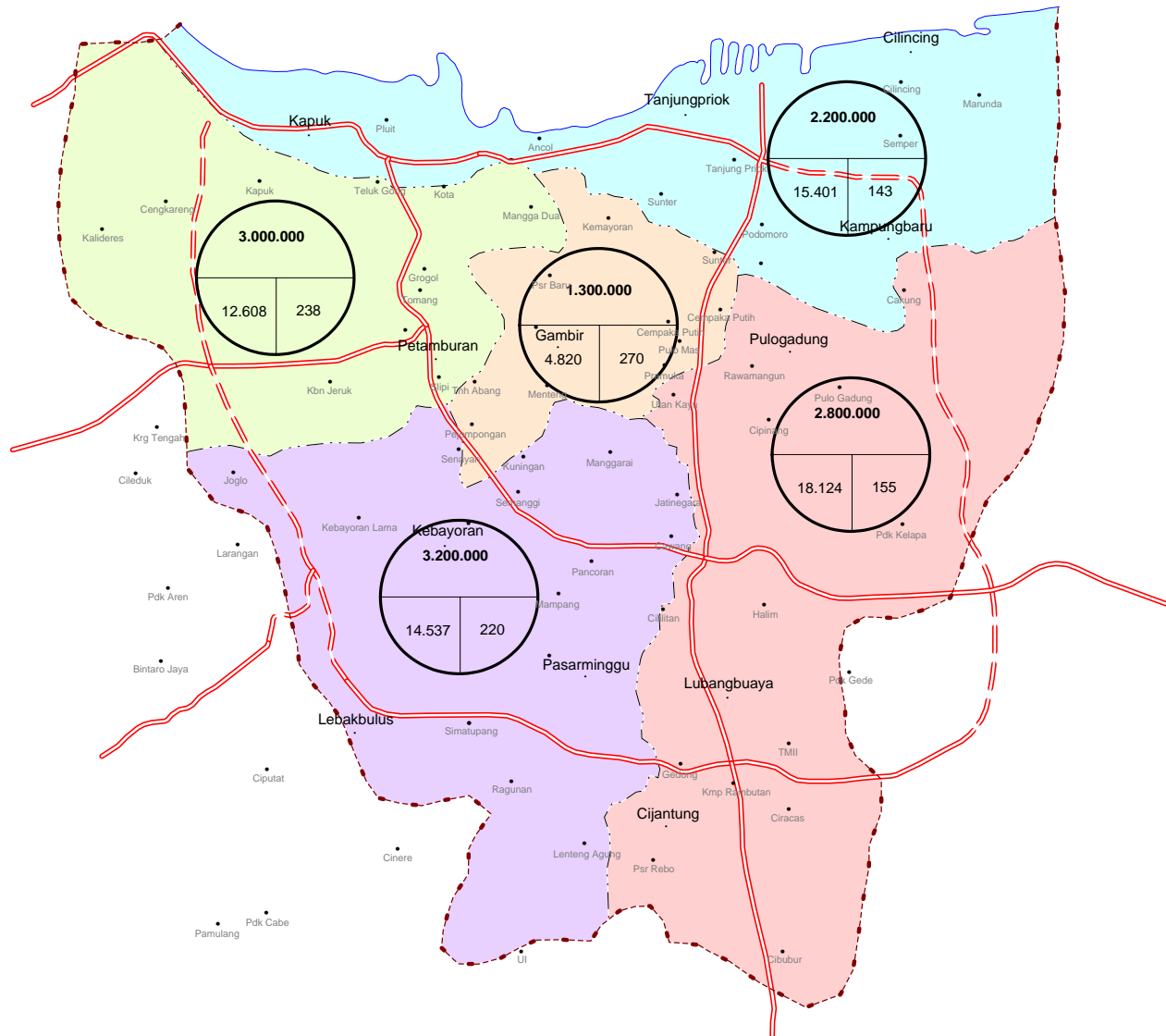
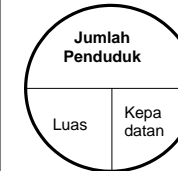
Arahan permukiman ini disesuaikan dengan kecenderungan jumlah dan kepadatan penduduk pada saat ini. Seperti dalam arahan kepadatan penduduk Propinsi DKI untuk tahun 2010 untuk Jakarta Timur kepadatan penduduk sebesar 155 orang/ha; Jakarta Barat 238 orang/ha; Jakarta Utara 143 orang/ha; Jakarta Selatan 220 orang/ha; dan Jakarta Pusat 270 orang/ha. Lebih lanjut arahan kepadatan penduduk untuk Propinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada peta berikut ini.

PETA ARAHAN KEPADATAN PENDUDUK 2010



LEGENDA :

- Jakarta Utara
- Jakarta Barat
- Jakarta Pusat
- Jakarta Timur
- Jakarta Selatan
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan lain
- Rel KA
- Batas kota
- Sungai



Sumber	Peta Reppropt 1:250.000 hasil digitasi Ditjen Pengairan PU Jakarta 2010
Jenis File	MapInfo 7.0
Nama File	Peta Arahlan Kepadatan Penduduk 2010.WOR



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH TENGAH

2.1.3 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN EKONOMI PROSPEKTIF

Arahan pemanfaatan ruang kawasan ekonomi prospektif diarahkan untuk :

1. Pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa yang wajib memperhitungkan dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang timbul dari aktifitas yang berlangsung pada kawasan tersebut;
2. Pembangunan fasilitas perdagangan/jasa dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan sarana tempat usaha yang ditata secara adil bagi semua golongan usaha termasuk pengembangan golongan usaha kecil;
3. Pembentukan areal penghubung antar bangunan dan/atau kompleks bangunan dalam rangka meningkatkan integrasi pembangunan kawasan ekonominya prospektif dibarengi dengan penyediaan ruang-ruang untuk golongan usaha skala kecil termasuk sektor informal dan ruang-ruang terbuka bersifat umum;
4. Pemanfaatan ruang pada kawasan campuran perumahan dan bangunan umum dapat berbentuk pita atau superblok dengan proporsi ruang untuk perumahan berkisar 35% sampai 65% dari total besaran ruang yang dibangun sesuai dengan kategori pola sifat lingkungan setempat;
5. Kawasan industri dan pergudangan wajib dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah; dan
6. Penataan kawasan pelabuhan dilakukan sebagai bagian integral dari penataan ruang kota.

2.1.4 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PUSAT KEGIATAN

Arahan pemanfaatan ruang kawasan pusat kegiatan untuk Pemanfaatan ruang pada sistem pusat kegiatan perkantoran, perdagangan dan Jasa

khususnya pada pusat bisnis dan pusat perbelanjaan diarahkan sebagai berikut:

1. Dilaksanakan berdasarkan Panduan Rancang Kota dan Panduan Pembangunan Kawasan;
2. Dapat diisi dengan kegiatan campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan perumahan, baik secara horizontal maupun vertikal;
3. Pembangunan per persil dilakukan berdasarkan Panduan Rancang Kota dan Panduan Pembangunan Kawasan dengan memperhitungkan keseimbangan antara manfaat ruang dan kewajiban penyediaan prasarana dan fasilitas umum;
4. Pengembangan prasarana untuk pejalan kaki;
5. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate management); dan
6. Pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

2.1.5 ARAHAN PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA WILAYAH

Pengembangan prasarana transportasi diarahkan melalui:

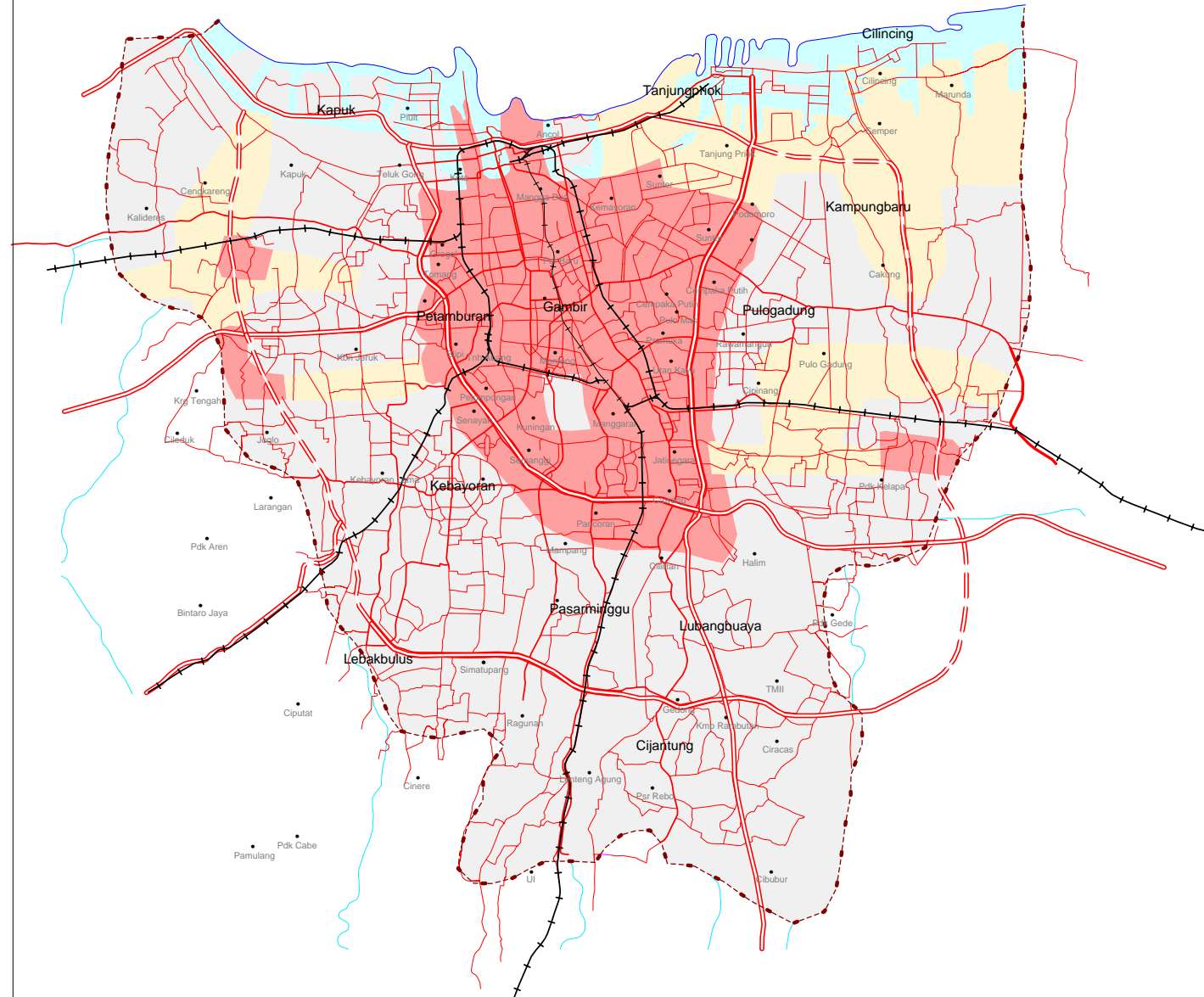
1. Peningkatan integrasi antara moda angkutan laut dan udara dengan moda angkutan darat dilakukan dengan menyediakan fasilitas penghubung (inter-face), sehingga dapat diperoleh jasa layanan angkutan yang terpadu;
2. Peningkatan pelayanan angkutan umum, dilakukan dengan upaya optimalisasi, perbaikan fisik dan pembangunan prasarana baru;
3. Pengembangan sistem angkutan umum kereta api dimulai dari peningkatan jaringan pelayanan yang sudah ada yaitu jalur lingkaran (*loop line*) dan jalur tengah (*central line*), serta lintasan baru

PETA ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI PROSPEKTIF



LEGENDA :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| Intensitas rendah | Jalan Tol |
| Intensitas tinggi | Jalan Arteri |
| Bukan kawasan ekonomi | Jalan Kolektor |
| Kawasan pantai | Jalan lain |
| | Rel KA |
| | Batas kota |
| | Sungai |



Sumber	Peta Repprot 1:250,000 hasil digitasi Ditjen Pengairan PU		
Digitasi		Diperiksa	
Jenis File	MapInfo 7.0		
Nama File	Peta Arahan Kws Ekonomi.WOR		



**DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH TENGAH**

diprioritaskan pada jalur Fatmawati - Kota dan Duri - Kemayoran dengan jaringan bawah tanah secara proporsional;

4. Peningkatan kelancaran arus lalu lintas kendaraan dilakukan melalui upaya optimalisasi pemanfaatan ruang jalan, perbaikan fisik dan pembangunan prasarana baru serta kualitas lingkungan hidup;
5. Pembangunan fasilitas jalan kaki yang memadai untuk menumbuhkan budaya berjalan kaki terutama untuk jarak perjalanan yang relatif pendek;
6. Peningkatan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dilakukan melalui peningkatan disiplin lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan, peningkatan pengawasan kelaikan kendaraan, serta pembangunan fasilitas-fasilitas yang mendukung keselamatan berlalu lintas.

2.1.6 PENGEMBANGAN PRASARANA SUMBER AIR DAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT

Pengembangan prasarana sumber air dan air bersih bagi masyarakat melalui:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan air bersih jaringan pipa melalui:
 - ✓ Pembangunan instalasi, produksi dan jaringan pipa distribusi yang baru untuk memperluas pelayanan;
 - ✓ Peningkatan kemampuan jangkauan instalasi penjernihan air guna menjamin kualitas air bersih;
 - ✓ Rehabilitasi seluruh jaringan pipa distribusi untuk mengurangi kebocoran;
 - ✓ Pencegahan dan penanggulangan pencemaran terhadap sumber air baku;

- ✓ Kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana/sarana pengendalian banjir dan penataan sungai terutama dalam hal pembiayaan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya.

2. Pengembangan prasarana irigasi diarahkan melalui :

- ✓ Perlindungan bangunan jaringan irigasi dengan memperhatikan kuantitas,
- ✓ kualitas dan kontinuitas aliran;
- ✓ Pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi yang belum memenuhi standar teknis.

3. Pengembangan prasarana air limbah diarahkan melalui:

- ✓ Perluasan pelayanan sistem *sewerage* (perpipaan tertutup) melalui pengembangan sistem terpusat dan sistem modular dengan menggunakan teknologi terbaik yang dapat diterapkan;
- ✓ Pengembangan fungsi waduk sebagai lokasi instalasi pengolahan air limbah;
- ✓ Pengelolaan air limbah dengan sistem daur ulang menyeluruh di Kawasan Pantura;
- ✓ Pemanfaatan areal RTH untuk instalasi pengolahan air limbah bawah tanah;
- ✓ Pengembalian fungsi drainase sebagai saluran air hujan secara bertahap yang disertai pengelolaan air limbah.

4. Pengembangan prasarana persampahan diarahkan melalui:

- ✓ Pengembangan lokasi baru bagi kegiatan *sanitary landfill* yang melayani wilayah bagian barat;
 - ✓ Penjajagan pengembangan teknik *sanitary landfill* di laut yang terpadu dengan reklamasi untuk melayani wilayah bagian utara;
 - ✓ Pengembangan teknologi transfer station untuk meningkatkan kapasitas daya angkut sampah ke lokasi TPA;
 - ✓ Pengembangan penggunaan *incinerator* untuk mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA;
 - ✓ Perluasan penggunaan teknik *komposting* dan alternatif teknologi lainnya dalam pengolahan sampah khususnya ibada sebagian WP Selatan-Utara dan WP Selatan-Selatan;
5. Meningkatkan efisiensi manajemen pengelolaan air bersih.
- ✓ Pembangunan hidrant umum dan terminal air pada kawasan yang berkepadatan penduduk tinggi dan rawan air bersih namun belum terlayani jaringan pipa distribusi;
 - ✓ Perluasan pemanfaatan air hujan sebagai sumber air bersih alternatif melalui reservoir alam dan buatan;
 - ✓ Perlindungan dan rehabilitasi terhadap reservoir air berupa waduk dan situ-situ dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sumber-sumber air di hulu serta kapasitas tampung dan bangunan reservoirnya;
 - ✓ Penyeimbangan kebutuhan dan penyediaan air tanah dengan membangun pengisian airtanah pada kawasan pengguna airtanah yang banyak, baik secara alamiah maupun melalui penggunaan teknologi;
- ✓ Perluasan pembangunan sumur resapan dan merintis pengisian reservoir air bawah tanah;
 - ✓ Pengurangan penggunaan air tanah pada kawasan yang sudah terlayani jaringan pipa distribusi air bersih;
 - ✓ Pengendalian penggunaan air tanah, terutama di kawasan resapan air dan rawan air tanah;
 - ✓ Perlindungan terhadap kawasan resapan air dari kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
6. Pengembangan prasarana pengendalian banjir dan drainase diarahkan melalui:
- ✓ Peningkatan kapasitas dan daya tampung prasarana pengendalian banjir 100 tahunan untuk Banjir Kanal Barat menjadi 500 M³/detik, peningkatan daya tampung Cengkareng Drain menjadi 510 M³/detik, pembangunan saluran penghubung sungai Sunter-Cakung dengan kapasitas 220 m³/detik, dimulainya pelaksanaan Banjir Kanal Timur dengan kapasitas 370 m³/detik, optimalisasi dan normalisasi 13 sungai utama dengan pengembangan sistem polder pada kawasan rendah;
 - ✓ Penataan kembali kawasan sempadan sungai bebas dari bangunan dan menjadikan sungai sebagai bagian dari halaman depan (*front yard*);
 - ✓ Peningkatan kapasitas saluran makro, sub makro, saluran mikro dan lokasi penampungan air yang ada melalui pengerukan secara berkala;
 - ✓ Pembangunan dan pengembalian fungsi situ-situ dan waduk sebagai lokasi tempat penampungan air;

- ✓ Pembangunan *recycle plant* untuk mengurangi volume sampah yang akan diangkut ke TPA khususnya di WP Tengah Pusat;
 - ✓ Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan persampahan melalui pelaksanaan konsep *Recycling* (daur ulang) *Reused* (penggunaan kembali) dan *Reduced* (pengurangan sampah);
 - ✓ Perluasan penggunaan metode pemilahan sampah, baik di sumber sampah, dalam proses pengangkutan maupun di TPA;
 - ✓ Pengembangan lokasi pengumpulan sampah B3 sebagai bagian dari sarana pengelolaan sampah B3 serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman sampah B3;
 - ✓ Pencegahan lokasi-lokasi tempat penampungan sementara (TPS) di pinggir sungai untuk menghindari pencemaran sungai.
7. Pengembangan prasarana energi diarahkan melalui;
- ✓ Pengembangan pelayanan gas dengan penambahan jaringan pipa gas bawah tanah serta dengan memperbaiki dan meningkatkan pemeliharaan jaringan yang ada di kawasan industri, permukiman, dan komersial terutama di WP Tengah;
 - ✓ Pengembangan pelayanan energi bahan bakar minyak bagi kawasan industri, permukiman, komersial dan transportasi;
 - ✓ Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik, melalui kabel bawah tanah terutama untuk kawasan perkantoran, komersial, industri dan permukiman baru;
 - ✓ Pembangunan stasiun-stasiun pompa bahan bakar gas (SPBG) baru, terutama melayani angkutan umum Bus, minibus dan taksi;

- ✓ Pengembangan pengadaan energi listrik melalui pembangkit tenaga listrik PU Muara Karang dan Tanjung Priok ke sistem laringan inter koneksi Jawa-Bali.

8. Pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan melalui:

- ✓ Peningkatan penggunaan sistem digital, baik dengan sistem kabel maupun dengan gelombang mikro;
- ✓ Pengembangan sistem jaringan sentral telepon fiber optik, jaringan kabel bawah tanah, sistem telepon bergerak dan koridor frekuensi bagi pelanggan tetap dan fasilitas umum; distribusi warung telekomunikasi dan telepon umum ke seluruh wilayah kota.

2.1.7 ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS

Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas, yaitu :

1. Pengembangan kawasan prioritas di tingkat propinsi ditetapkan berdasarkan besar dan strategisnya kontribusi yang diberikan dalam pembangunan kota untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai kota jasa internasional.
2. Kawasan prioritas untuk wilayah Kotamadya ditetapkan berdasarkan kontribusi terhadap upaya pencapaian misi pembangunan wilayah Kotamadya yang bersangkutan.
3. Kawasan tingkat propinsi, meliputi :
 - ✓ Kawasan Pantura:
 - ✓ Penataan koridor 13 sungai:

- ✓ Pembangunan Banjir Kanal Timur : Diupayakan pemanfaatannya selain berfungsi sebagai prasarana pengendali banjir, juga untuk kepentingan transportasi dan rekreasi;
- ✓ Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal dan penataan ruang pada sepanjang koridornya agar terpadu dengan Sistem Angkutan Umum Massal.

2.1.8 ARAHAN KEBIJAKAN TATA GUNA AIR, TATA GUNA LAUT, TATA GUNA UDARA, DAN TATA GUNA RUANG BAWAH TANAH

Arahan kebijakan tata guna air meliputi kebijakan terhadap tata guna air permukaan dan tata guna air tanah, Pengembangan penatagunaan air permukaan dilakukan melalui penetapan peruntukan air sungai, situ dan waduk meliputi:

1. Air sungai, ditetapkan untuk :
 - ✓ sumber air baku air minum;
 - ✓ kegiatan usaha perkotaan;
 - ✓ keperluan wisata dan transportasi;
 - ✓ pengembangan perikanan, pertanian dan peternakan.
2. Arahan pengembangan penatagunaan air permukaan adalah sebagai berikut:
 - ✓ Meningkatkan kualitas dan debit air sungai dilakukan secara terpadu mencakup daerah aliran sungai (DAS) dengan berpedoman kepada peruntukan air sungai tersebut;
 - ✓ Stasiun pemantauan kualitas dan debit air sungai ditempatkan di lokasi-lokasi yang sesuai dengan peruntukannya;

- ✓ Peningkatan kualitas dan volume air situ dan waduk dilakukan secara terpadu mencakup daerah tangkapan airnya dengan berpedoman kepada peruntukan air situ dan atau waduk;
- ✓ Untuk sumber air kebutuhan Kota Jakarta yang berada di luar wilayah administrasi Kota Jakarta, kebijakan yang ditempuh adalah melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait serta ikut berupaya memelihara kelestarian sumber-sumber air.

3. Arahan pengembangan dan pemeliharaan yang ditempuh untuk memelihara dan memperbaiki kondisi permukaan air tanah dangkal maupun air tanah dalam adalah :
 - ✓ Pengawasan secara ketat pada pengambilan langsung air tanah dan terutama air tanah dalam;
 - ✓ Mengendalikan secara ketat dalam pembangunan ruang bawah tanah;
 - ✓ Melakukan injeksi air tanah dalam di zona kritis di bagian Utara dan zona rawan di bagian tengah Kota Jakarta;
 - ✓ Mengawasi realisasi kewajiban pembuatan sumur resapan terutama di bagian selatan kota Jakarta;
 - ✓ Mencegah merembesnya limbah cair ke dalam tanah.
4. Arahan kebijakan tata guna laut meliputi: konservasi kawasan-kawasan hijau lindung, rehabilitasi, mempertahankan kualitas air laut, dan mendayagunakan pemanfaatan penggunaan ruang lautan. Arahan pengembangan tata guna laut adalah sebagai berikut :

- ✓ konservasi bagi kawasan-kawasan hijau lindung sesuai ekosistemnya khususnya di wilayah pesisir Pantai Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu;
 - ✓ Rehabilitasi untuk memulihkan tatanan ekosistem yang telah mengalami kerusakan dan atau pencemaran khususnya wilayah pesisir Pantai Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu;
 - ✓ Mempertahankan kualitas air laut yang memenuhi baku mutu untuk pelestarian sumberdaya terumbu karang beserta ekosistemnya;
 - ✓ Mendayagunakan pemanfaatan penggunaan ruang lautan secara terpadu untuk berbagai kepentingan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungannya seperti perhubungan, rekreasi dan olah raga, jalur pipa minyak bawah laut serta kabel telekomunikasi bawah laut.
5. Arahan kebijakan tata guna udara meliputi: pemanfaatan ruang udara untuk *atmosphere* kehidupan, transportasi, telekomunikasi, transmisi listrik, bangunan tinggi, bangunan atas tanah, bangunan atas air dan ruang pandang.

Arahan pengembangan tata guna ruang bawah tanah di bawah lahan areal kepemilikan pribadi dilakukan berdasarkan ketentuan bangunan dan batasan intensitas bangunan yang pemanfaatannya terutama untuk parkir, gudang, ruang komersil dan ruang untuk kepentingan militer beserta ruang fasilitas penunjangnya. Arahan pengembangan tata ruang bawah tanah di bawah lahan areal kepemilikan umum adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan untuk pengembangan sistim prasarana transportasi yang diarahkan untuk pengembangan Sistim Angkutan Umum Massal beserta fasilitas penunjangnya;

2. Pemanfaatan untuk jalur penghubung dalam sistim transportasi kendaraan umum dan pejalan kaki beserta fasilitas penunjangnya;
3. Pemanfaatan untuk pengembangan jaringan utilitas dan sanitasi;
4. Pembangunan ruang bawah tanah harus memperhatikan struktur geologi dan geohidrologi serta keterpaduan antar bangunan bawah tanah maupun bangunan di atasnya, pengaturan yang lebih rinci tentang bangunan bawah tanah akan diatur tersendiri.

2.2 RENCANA STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH KOTAMADYA

Rencana struktur tata ruang wilayah kotamadya diwujudkan dengan pemanfaatan ruang di masing-masing kotamadya yang terdiri atas:

2.2.1 KAWASAN HIJAU LINDUNG

A. Jakarta Utara

Kawasan Hijau Lindung terdapat pada wilayah Kotamadya Jakarta Utara di Kepulauan Seribu dan Kecamatan Penjaringan, dilakukan dengan:

1. Melestarian ekosistem terumbu karang dan hutan bakau/mangrove sebagai bagian dari kegiatan pariwisata;
2. Penyelamatan keutuhan potensi keanekaragaman hayati baik potensi fisik wilayahnya (habitat), potensi sumber daya kehidupan serta keanekaragaman sumber genetiknya;
3. Penanaman hutan bakau di kawasan pantai dan pelestarian hutan bakau di Angke;

4. Pembangunan taman kota dengan penanaman pohon produktif di sekitar Waduk Pluit, Waduk Sunter dan Waduk Kemayoran;
5. Penanaman pohon pelindung di areal pemakaman yang berfungsi sebagai peneduh;
6. Penanaman pohon pelindung di Jalan Tol Sediatio dan Jalan tol Cakung-Cilincing serta jalan tol menuju Pelabuhan;
7. Penanaman pohon pelindung mengikuti sempadan sungai
8. Melaksanakan refungsionalisasi taman pada 26 lokasi seluas ± 12,17 Ha;
9. Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau di kawasan permukiman padat, terutama di kawasan Pademangan, Penjaringan, dan Cilincing.

B. Jakarta Barat

Kotamadya Jakarta Barat meliputi :

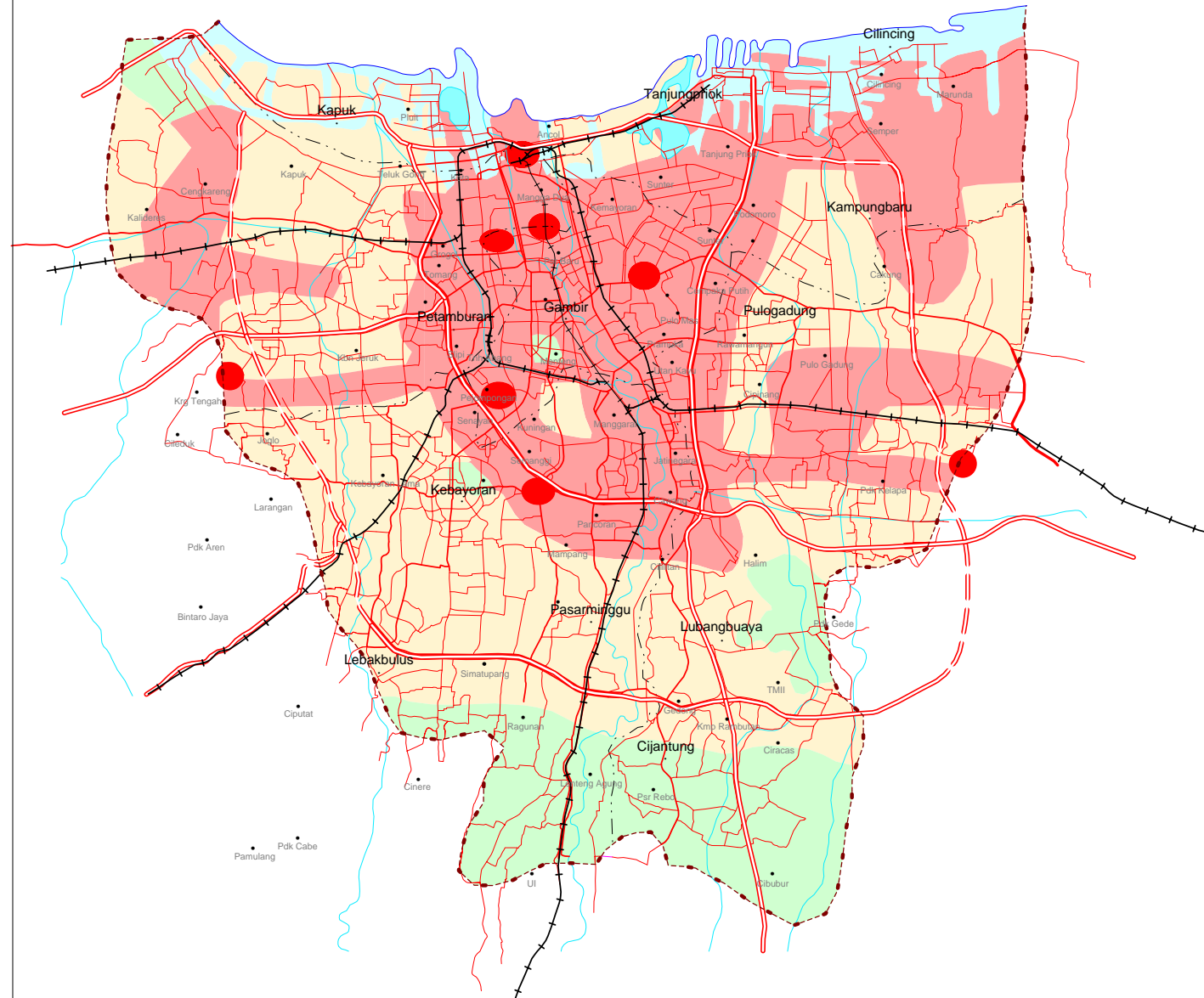
1. Intensifikasi pertanian di sekitar Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Soekarno Hatta;
2. Pembangunan taman kota dan penanaman pohon pelindung di Sentra Primer Baru Barat, Tambora dan Taman Sari;
3. Penanaman pohon pelindung di areal pemakaman yang berfungsi sebagai peneduh;
4. Pengembangan hutan kota di Srengseng untuk kegiatan wisata;
5. Penataan kawasan Rawa Belong sebagai pusat tanaman hias;
6. Melaksanakan refungsionalisasi taman pada 14 lokasi seluas ± 3,44 Ha;

PETA STRUKTUR RUANG WILAYAH DKI JAKARTA



LEGENDA :

- Permukiman
- Kws Ekonomi Prospektif
- Kawasan Hijau
- Kawasan pantai
- Pusat Kegiatan Utama
- Jalan Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan lain
- Rel KA
- Batas kota
- Sungai



Sumber	Peta Repprot 1:250.000 hasil digitasi Dijen Pengairan PU
Jenis File	Jakarta 2010
Nama File	Mapinfo 7.0
	Peta Struktur Ruang WOR



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
 DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
 DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH TENGAH

7. Penanaman pohon pelindung mengikuti Sempadan sungai.

C. Jakarta Selatan

Kotamadya Jakarta Selatan meliputi :

- a. Pengembangan budi daya tanaman hias dan tanaman produktif terutama di Kecamatan Pasar Minggu, Jagakarsa dan Cilandak;
- b. Pengembangan hutan kota di Taman Margasatwa Ragunan dan Blok P Kebayoran Baru;
- c. Pengembangan areal budi daya perikanan terutama di Situ Manggabolong, Situ Babakan, Situ Ulujami, Situ Kalibata, dan Situ Pancoran;
- d. Penanaman pohon pelindung di areal pemakaman yang berfungsi sebagai peneduh;
- e. Pembatasan kegiatan fisik dan kegiatan pelayaran sekitar daerah yang dilindungi.

2.2.2 KAWASAN HIJAU BINAAN

A. Kotamadya Jakarta Pusat

Kotamadya Jakarta Pusat meliputi :

1. Penghijauan dengan tanaman yang berbiji pada koridor habitat burung di Kemayoran, lapangan Banteng, Monas, Sudirman Thamrin dan Senayan;
2. Penghijauan jalur jalan, sungai dan kereta api dengan jenis tanaman berbunga sesuai dengan wilayahnya;
3. Penataan areal pemakaman dan penanaman pohon pelindung yang berfungsi sebagai peneduh;

4. Melaksanakan refungsionalisasi taman pada 30 lokasi seluas \pm 9 Ha;
5. Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau di kawasan permukiman yang padat penduduk, terutama di Karang Anyar. Galur, Kebon Kosong, Petojo Selatan, Johar Baru, Duri Pulo, Tanah Tinggi dan Kampung Rawa;
6. Pengadaan ruang terbuka hijau untuk budi daya ikan hias;
7. Penanaman pohon pelindung mengikuti sempadan sungai.

B. Kotamadya Jakarta Utara

Kotamadya Jakarta Utara meliputi :

1. Pengembangan hutan kota di sekitar Situ Babakan, Situ Manggabolong dan Situ Kampus UI Jagakarsa;
2. Melaksanakan refungsionalisasi taman pada 18 lokasi seluas \pm 7,63 Ha;
3. Pengadaan lahan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman padat penduduk;
4. Penanaman pohon pelindung mengikuti sempadan sungai.

C. Kotamadya Jakarta Timur

Kotamadya Jakarta Timur meliputi :

- a. Pengembangan program pertanian pada wilayah bagian selatan jalan lingkar luar di Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas dan Cipayang;
- b. Peningkatkan budidaya tanaman hias di kawasan TMII, taman bunga Cibubur dan tanaman buah-buahan di Condet;
- c. Penanaman pohon pelindung di areal pemakaman yang berfungsi sebagai peneduh;

- d. Peningkatan hutan kota di Rawa Dongkel, Kopasus Cijantung, Pacuan Kuda, Pulomas, Kawasan Industri Pulo Gadung, Mabes TNI Cilangkap, Kompleks Halim Perdana Kusuma;
- e. Pengembangan Taman Kota untuk rekreasi alam di sekitar situ Kelapa Dua Wetan, Rawa Dongkel, Dongkelan Baru, Rorotan, Tipar, Waduk Pulomas, Bujana Tirta, Penggilingan dan Rawa Bening;
- f. Pembangunan taman kota antara lain di kawasan Sentra Primer Baru Timur dan kawasan permukiman baru;
- g. Peningkatan penghijauan pada jalur jalan antara lain di jalan Tol Jagorawi, Tol Cikampek & jalan Arteri serta di sepanjang daerah aliran sungai yang menjorok ke dalam kota (Ciliwung, Cipinang, Sunter, Cakung, Cakung Drain, Buaran & Jati Kramat);
- h. Melaksanakan refungsionalisasi taman pada 6 lokasi seluas ± 2,26 Ha;
- i. Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau di kawasan permukiman padat penduduk.

2.2.3 KAWASAN PERMUKIMAN

Pemanfaatan ruang kawasan permukiman di masing-masing Kotamadya adalah sebagai berikut :

A. Kotamadya Jakarta Pusat :

1. Pembangunan rumah susun di kawasan permukiman kumuh berat untuk masyarakat berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi di Kelurahan Petamburan, Karet Tengsin, Bendungan Hilir, Kelurahan Tanah Tinggi, Kampung Rawa, dan Jati Bunder;

2. Perbaikan bangunan rumah dan lingkungan di kawasan permukiman kumuh ringan melalui program Tribina;
3. Pelestarian bentuk dan fungsi bangunan dalam rangka pemugaran di daerah Menteng.

B. Kotamadya Jakarta Utara

Kawasan permukiman di Kotamadya Jakarta Utara diarahkan untuk :

1. Pembangunan rumah susun sederhana pada kawasan permukiman kumuh berat di sekitar pelabuhan Tanjung Priok, Kamal, Kali Baru. Koja, Cilincing, Pademangan dan Penjaringan;
2. Pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan menengah dan tinggi pada areal reklamasi Pantai Utara, Kelapa Gading dan Penjaringan;
3. Perbaikan lingkungan permukiman di Kepulauan Seribu;
4. Perbaikan bangunan rumah dan lingkungan di kawasan permukiman kumuh ringan melalui Program Tribina.

C. Kotamadya Jakarta Barat

Arah pemanfaatan untuk kawasan permukiman di Kotamadya Jakarta Barat, yaitu :

1. Perbaikan lingkungan pada daerah kumuh terutama kawasan stasiun Angke, stasiun Duri dan sepanjang jalur jalan kereta api;
2. Pembangunan rumah susun sederhana pada permukiman kumuh berat di Kali Angke, Duri Utara, Tambora, Kapuk, Rawa Buaya, Kali Anyar, Kedaung Bali Angke dan lain-lain;
3. Pembangunan kawasan permukiman baru.

D. Kotamadya Jakarta Selatan

Arah pemanfaatan permukiman untuk Kotamadya Jakarta Selatan, yaitu:

1. Peremajaan kawasan kota dengan perumahan vertikal dengan intensitas tinggi di Setia Budi, Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan dan Pesanggrahan;
2. Pembangunan rumah susun sederhana di kawasan padat penduduk terutama di Kecamatan Tebet, Pancoran, Kebayoran Lama dan Mampang Prapatan;
3. Perbaikan lingkungan pada kawasan yang relatif padat penduduk dan rawan banjir, di Kecamatan Pancoran, Tebet dan Mampang Prapatan.

E. Kotamadya Jakarta Timur

Arah pemanfaatan permukiman untuk Kotamadya Jakarta Timur, yaitu :

1. Pembangunan kawasan permukiman baru di Kecamatan Kramat Jati Perbaikan lingkungan pada permukiman padat di seluruh kecamatan;
2. Pembangunan dan peningkatan rumah susun di Cipinang Besar Utara, Klender, Pondok Kelapa, Bidara Cina, Pulo Gadung, dan Pisangan.

2.2.4 PEMANFAATAN RUANG KAWASAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN

Pemanfaatan ruang kawasan industri dan pergudangan di masing-masing Kotamadya adalah:

A. Kotamadya Jakarta Pusat

Pemanfaatan ruang kawasan industri di Kotamadya Jakarta Pusat, diarahkan untuk relokasi kegiatan industri menengah dan besar secara bertahap dari Kecamatan Sawah Besar.

B. Kotamadya Jakarta Utara

Pemanfaatan ruang kawasan industri di Kotamadya Jakarta Utara, diarahkan untuk

- a. Penataan industri kecil termasuk penyediaan pengelolaan limbah di Cilincing dan Kali Baru;
- b. Relokasi industri menengah dan besar yang berpolusi dari Ancol Barat, Marunda dan Cilincing;
- c. Penyediaan fasilitas pergudangan untuk menunjang kegiatan perdagangan dan jasa di Penjaringan, Koja, Kelapa Gading, dan Cilincing.

C. Kotamadya Jakarta Barat

Pemanfaatan ruang kawasan industri di Kotamadya Jakarta Barat, diarahkan untuk :

1. Pembangunan kawasan industri di Cengkareng, Kalideres serta sepanjang koridor Sungai Mookervart;
2. Pembangunan pergudangan di Cengkareng dan Kalideres.

D. Kotamadya Jakarta Selatan

Arah pemanfaatan ruang kawasan industri di Kotamadya Jakarta Selatan, yaitu : Relokasi kegiatan industri besar dan menengah secara bertahap dari Kecamatan Kebayoran Lama.

E. Kotamadya Jakarta Timur

Arah pemanfaatan ruang kawasan industri di Kotamadya Jakarta Timur, yaitu:

1. Penataan kawasan industri di Pulo Gadung, Cakung, Ciracas dan Pekayon menjadi kawasan industri selektif;
2. Penataan industri yang berlokasi di dekat permukiman dengan penyediaan fasilitas pengolahan limbah terutama di Penggilingan, Pondok Bambu, Duren Sawit dan Kramatjati;
3. Pembangunan pergudangan yang menunjang kegiatan industri, dan perdagangan di Kecamatan Cakung terutama disepanjang jalan Cakung- Cilincing dan jalan Lingkar Luar.

2.2.5 PEMANFAATAN RUANG SISTEM PUSAT KEGIATAN

Pemanfaatan ruang untuk Sistem Pusat Kegiatan di masing -masing Kotamadya adalah :

A. Kotamadya Jakarta Pusat

Arah pemanfaatan ruang kawasan industri di Kotamadya Jakarta Selatan, yaitu :

1. Pembangunan kembali fasilitas perdagangan dan perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan menyediakan ruang bagi pengusaha ekonomi lemah serta penataan terminal penumpang secara terpadu dengan angkutan kereta api di Kawasan Senen;
2. Pembangunan kembali fasilitas perdagangan dengan peningkatan sarana perparkiran serta penyediaan sarana dan prasarana pejalan kaki;

3. Peremajaan pasar lama dan pengaturan moda angkutan umum pada Kawasan Bendungan Hilir.

B. Kotamadya Jakarta Utara

Arah pemanfaatan ruang kawasan industri di Kotamadya Jakarta Utara, yaitu:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan pemerintahan tingkat Kotamadya secara terpadu di kawasan Jalan Yos Sudarso;
2. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penanaman pohon pelindung secara terpadu melalui penataan sarana dan prasarana pejalan kaki di Kawasan Kelapa Gading.

C. Kotamadya Jakarta Barat

Arah pemanfaatan ruang kawasan industri di Kotamadya Jakarta Barat, yaitu :

- a. Pembangunan baru terutama fasilitas perkantoran dan rumah susun beserta fasilitasnya serta pengembangan RTH Kawasan Jalan S. Parman;
- b. Perbaikan lingkungan pasar lama dengan peningkatan sarana dan prasarana pejalan kaki di Cengkareng;
- c. Pembangunan pasar induk baru sebagai pusat distribusi bahan pangan terpadu dengan sistem transportasi di Rawa Buaya.

D. Kotamadya Jakarta Selatan

Arah pemanfaatan ruang kawasan industri di Kotamadya Jakarta Selatan, yaitu :

1. Pengembangan sarana perpajakan terpadu dengan terminal disertai penataan sarana pedagang Kaki Lima pada Kawasan; Blok M;
2. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parkir di Kawasan Mayestik;
3. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penyediaan sarana prasarana angkutan umum terpadu angkutan kereta api di Kebayoran Lama;
4. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parkir di Mampang Prapatan;
5. Pembangunan kembali pasar lama terpadu dengan sistem transportasi di Pasar Minggu;
6. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki dan parkir di Cilandak.

E. Kotamadya Jakarta Timur

Arah pemanfaatan ruang kawasan industri di Kotamadya Jakarta Timur, yaitu:

1. Perbaikan lingkungan fasilitas perdagangan lama dan peningkatan fasilitas perdagangan batu aji yang disertai dengan penataan sarana dan prasarana pejalan kaki terpadu dengan sistem transportasi di Kawasan Jatinegara;
2. Peremajaan lingkungan Pasar Induk Sebagai pusat distribusi bahan pangan di Kramat Jati;
3. Peningkatan kapasitas pasar induk pusat distribusi bahan pangan beras terpadu dengan sistem transportasi di Cipinang;

2.2.6 PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA WILAYAH

Untuk pengembangan prasarana transportasi dimasing-masing Kotamadya, yaitu :

A. Kotamadya Jakarta Pusat

Arah pengembangan prasarana transportasi untuk Kotamadya Jakarta Pusat, yaitu :

1. Pengembangan ruas Timur - Barat, termasuk penyelesaian persimpangan jalan arteri dan perlintasan jalan kereta api yang diprioritaskan pada ruas Tanah Abang - Pulo Gadung, Jatinegara - Ancol, Tanah Abang - Pal Merah;
2. Pembatasan lalu lintas melalui penerapan kebijakan kawasan terbatas lalu lintas (restricted zone) serta pengaturan perpajakan di kawasan Sawah Besar, Mangga Besar dan Gajah Mada - Hayam Wuruk;
3. Pembangunan jaringan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus terutama di kawasan Cikini, Kramat;
4. Pembangunan jalan inspeksi sepanjang sungai dan jalah kereta api di sepanjang Kali Sentiong, Kali Ciliwung, Kali Utan Kayu, Kali Item;
5. Pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk penyeberangan terutama di kawasan Senen dan Tanah Abang;
6. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem angkutan umum massal;
7. Penataan moda angkutan umum yang disesuaikan dengan hirarkhi jalan;

8. Penataan manajemen lalu lintas dan penyediaan kelengkapan sarana lalu lintas pada kawasan yang padat lalu lintas terutama di sekitar terminal bus dan stasiun kereta api serta seperti di kawasan Johar baru, Kali Baru, Bendungan Jago.

B. Kotamadya Jakarta Utara

Arah pengembangan prasarana transportasi untuk Kotamadya Jakarta Utara, yaitu :

- a. Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem angkutan umum massal;
- b. Peningkatan jaringan dan jalan arteri yang mendukung sistem transportasi antar wilayah di kawasan Marunda dan jalan Kamal Raya;
- c. Peningkatan jaringan dan kapasitas jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan terobosan terutama pada pusat perdagangan dan jasa;
- d. Peningkatan manajemen lalu lintas dan pembangunan fasilitas pejalan kaki terutama di kawasan Yos Sudarso, Cilincing, Martadinata dan Lodan;
- e. Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan di perbatasan Kabupaten Tangerang dan Kotamadya Bekasi.

C. Kotamadya Jakarta Barat

Arah pengembangan prasarana transportasi untuk Kotamadya Jakarta Barat, yaitu :

1. Pembangunan dan peningkatan jalan pada perbatasan Kodya Tangerang, sisi selatan Kali Mookervart, jalan sejajar kereta api Rawa Buaya serta Sentra Primer Barat;

2. Peningkatan manajemen lalulintas termasuk perbaikan simpang di kawasan Kebon Jeruk, Kembangan dan Tambora;
3. Penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan seperti gedung parkir di kawasan Glodok, serta penataan parkir pada kawasan-kawasan yang rawan kemacetan lalu lintas;
4. Pembangunan fasilitas pejalan kaki di kawasan Kota Tua;
5. Melanjutkan pembangunan terminal penumpang Rawa Buaya berikut sarana dan prasarana penunjang;
6. Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem angkutan umum masal.

D. Kotamadya Jakarta Selatan

Arah pengembangan prasarana transportasi untuk Kotamadya Jakarta Selatan, yaitu :

1. Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana sistem angkutan umum massal;
2. Pembangunan jaringan jalan arteri yang mendukung sistem transportasi antar wilayah yang menuju ke arah barat;
3. Peningkatan dan penerapan manajemen lalulintas serta penyediaan fasilitas pejalan kaki terutama di Kawasan Segitiga Kuningan, Kebayoran Baru dan Mampang Prapatan;
4. Peningkatan jaringan jalan yang mendukung lalu lintas antar wilayah di perbatasan Kabupaten Bogor dan Tangerang;
5. Penataan moda umum yang disesuaikan dengan hirarkhi jalan, berikut fasilitas penunjangnya.

E. Kotamadya Jakarta Timur

Arah pengembangan prasarana transportasi untuk Kotamadya Jakarta Timur, yaitu :

- a. Pembangunan jaringan jalan penunjang Sentra Primer Baru Timur dan yang melayani pusat-pusat kegiatan lainnya;
- b. Pembangunan jalan lokal yang berfungsi sebagai jalan tembus serta jalan inspeksi sungai;
- c. Peningkatan dan penerapan manajemen lalu lintas dan fasilitas pejalan kaki terutama di kawasan Sentra Primer Baru Timur, Jatinegara;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana penunjang Terminal Kampung Rambutan dan relokasi Terminal penumpang Pulo Gadung;
- e. Peningkatan jaringan jalan yang mendukung lalu lintas antar wilayah di perbatasan Kodya Bogor dan Bekasi;
- f. Penataan moda angkutan umum yang disesuaikan dengan hirarkhi jalan berikut fasilitas penunjangnya;
- g. Pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana transportasi yang terpadu dengan sistem angkutan umum massal.

2.2.7 AIR BERSIH

Prasarana sumber air dan air bersih di masing-masing Kotamadya.

A. Kotamadya Jakarta Pusat

Arah pemanfaatan prasarana sumber air dan air bersih untuk Kota Jakarta Pusat diarahkan:

- a. Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi

yang belum terlayani air bersih, terutama pada kawasan yang padat penduduknya;

- b. Pemanfaatan waduk sebagai reservoir air di Waduk Melati dan Waduk Senayan;
- c. Pembatasan pengambilan air tanah dangkal secara bertahap;
- d. Pelarangan pengambilan air tanah dalam terutama di kawasan zona kritis air tanah;
- h. Perluasan daerah resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau.

B. Kotamadya Jakarta Utara

Arah pemanfaatan prasarana sumber air dan air bersih untuk Kota Jakarta Utara diarahkan:

1. Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, terutama pada kawasan yang padat penduduknya;
2. Peningkatan pelayanan air minum untuk Kepulauan Seribu dengan pengembangan sistem pengangkutan, reservoir, jaringan perpipaan serta peningkatan penggunaan air laut hasil olahan;
3. Pembatasan pengambilan airtanah dangkal di kawasan permukiman secara bertahap;
4. Pelarangan pengambilan air tanah dalam terutama di zona kritis air tanah;
5. Perluasan kawasan resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau;

C. Kotamadya Jakarta Barat

Arah pemanfaatan prasarana sumber air dan air bersih untuk Kota Jakarta Barat diarahkan:

1. Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, terutama pada kawasan permukiman yang padat penduduk;
2. Pembatasan pengambilan air tanah dangkal di kawasan permukiman secara bertahap;
3. Pelarangan pengambilan air tanah dalam terutama di zona kritis air tanah;
4. Perluasan kawasan resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau.

D. Kotamadya Jakarta Selatan

Arah pemanfaatan prasarana sumber air dan air bersih untuk Kota Jakarta Selatan diarahkan:

1. Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, terutama pada kawasan yang padat penduduk;
2. Pembatasan pengambilan air tanah dangkal di kawasan permukiman secara bertahap;
3. Pelarangan pengambilan air tanah dalam di zona kritis air tanah;
4. Perluasan kawasan resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau;

5. Pencegahan peresapan air limbah ke dalam tanah dan pencemaran sumber-sumber air terutama di Jagakarsa, Cilandak dan Pasar Minggu.

E. Kotamadya Jakarta Timur

Arah pemanfaatan prasarana sumber air dan air bersih untuk Kota Jakarta Timur diarahkan:

1. Perluasan jaringan pelayanan air bersih melalui peningkatan kegiatan pendistribusian dan penyediaan hidrant umum di lokasi yang belum terlayani air bersih, terutama pada kawasan permukiman yang padat penduduknya;
2. Pembatasan pengambilan air tanah dangkal di kawasan permukiman secara bertahap;
3. Pelarangan pengambilan air tanah dalam terutama di zona kritis air tanah;
4. Perluasan kawasan resapan air melalui penambahan ruang terbuka hijau;
5. Pencegahan air limbah ke dalam tanah dan pencemaran sumber-sumber air terutama di Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Kramat Jati dan Makasar;
6. Pengamanan dan peningkatan fungsi Kanal Tarum Barat.

2.2.8 PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA TATA AIR DAN PENGENDALIAN BANJIR

Pengembangan prasarana dan sarana tata air dan pengendalian banjir di masing-masing Kotamadya

A. Kotamadya Jakarta Pusat

Pengembangan prasarana dan sarana tata air dan pengendalian banjir di Kota Jakarta Pusat, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas Kali Ciliwung, Kali Sentiong, Kali Malang, Kali Item, Kali Mali;
2. Pembangunan dan peningkatan kapasitas saluran untuk menyelesaikan masalah genangan air terutama di kawasan Sawah Besar, Mangga Besar, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R (reused, reduced, dan recycling).

B. Kotamadya Jakarta Utara

Pengembangan prasarana dan sarana tata air dan pengendalian banjir di Kota Jakarta Utara, yaitu :

1. Pembangunan jaringan prasarana air limbah pada kawasan Tanjung Priok, Pantai Mutiara, dan Pluit serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah di Waduk Pluit dan Waduk Sunter;
2. Pembangunan *septic tank* komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang terutama pada kawasan kumuh;
3. Peningkatan kapasitas transfer station di Sunter dan pembangunan transfer station di Pluit, Sunter Utara dan Cilincing;
4. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah di antaranya penggunaan *incinerator* yang ditempatkan pada kawasan permukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani;

5. Pengadaan lokasi penampungan sementara pada setiap kelurahan;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R (reused, reduced, dan recycling);
7. Penanganan sampah/limbah di perairan laut.

C. Kotamadya Jakarta Barat

Pengembangan prasarana dan sarana tata air dan pengendalian banjir di Kota Jakarta Barat, yaitu :

1. Pembangunan jaringan prasarana air limbah pada kawasan Glodok, Grogol, sekitar Jl. S Parman, Tanjung Duren dengan pembangunan instalasi pengolahan air limbah di Waduk Grogol dan Waduk Tomang;
2. Pembangunan *septic tank* komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang terutama pada kawasan kumuh;
3. Pembangunan transfer station di Duri Kosambi;
4. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah di antaranya penggunaan *incinerator* yang ditempatkan pada kawasan permukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani;
5. Pengadaan lokasi penampungan sementara pada setiap kelurahan;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R (reused, reduced, dan recycling).

D. Kotamadya Jakarta Selatan

Pengembangan prasarana dan sarana tata air dan pengendalian banjir Kota Jakarta Selatan, yaitu :

1. Pembangunan jaringan prasarana air limbah pada kawasan Kuningan, Setiabudi, Casablanca, Tebet dan Manggarai serta peningkatan kapasitas, Instalasi Pengolahan Air Limbah Waduk Setiabudi;
2. Pembangunan septictank komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang terutama pada kawasan kumuh;
3. Pembangunan transfer station di bagian selatan jalan lingkaran luar;
4. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah di antaranya penggunaan incinerator yang ditempatkan pada kawasan permukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani;
5. Pengadaan lokasi penampungan sementara pada setiap kelurahan;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R (reused, reduced, dan recycling);

E. Kotamadya Jakarta Timur

Pengembangan prasarana dan sarana tata air dan pengendalian banjir Kota Jakarta Timur, yaitu :

1. Pembangunan jaringan prasarana air limbah pada kawasan Pulo Mas dan Kelapa Gading sekaligus dengan pembangunan instalasi Pengolahan Air Limbah Waduk Pulo Mas dan jaringan prasarana air limbah dari instalasi pengolah air limbah pada kawasan Pulo Gadung;
2. Pembangunan septictank komunal pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang terutama pada kawasan kumuh;

3. Peningkatan kapasitas transfer station di Cakung dan pembangunan transfer station di bagian selatan jalan lingkaran luar;
4. Pengembangan penggunaan teknologi pengolahan sampah di antaranya penggunaan incinerator yang ditempatkan pada kawasan permukiman padat di sisi bantaran sungai yang belum sepenuhnya terlayani;
5. Pengadaan lokasi penampungan sementara pada setiap kelurahan;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan penerapan konsep 3R (reused, reduced, dan recycling).

Kebijakan pengembangan prasarana dan sarana tata air dan pengendalian banjir ini terkait dengan kebijakan kependudukan terutama jumlah dan kepadatan penduduk. Untuk itu arahan kepadatan penduduk untuk tahun 2010 jumlah dan kepadatannya dapat dilihat pada peta berikut.

2.2.9 PENGEMBANGAN SEKTOR LISTRIK, GAS, TELEKOMUNIKASI

Pengembangan sektor Listrik dan Gas di setiap wilayah Kotamadya, yaitu :

1. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Pemerataan pelayanan penerangan jalan umum padaseluruh lingkungan permukiman dan peningkatan kualitas penerangan jalan umum pada jalan protokol, jalan penghubung, taman serta pusat-pusat aktifitas masyarakat;
3. Pengembangan pelayanan dan penambahan jaringan distribusi gas terutama di kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta rumah susun;

4. Pengembangan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui pemerataan pengadaan Stasiun Pengadaan Bahan Bakar Gas (SPBBG).

Pengembangan prasarana dan sarana Telekomunikasi di setiap wilayah Kotamadya adalah:

1. Pengembangan sistem pelayanan telekomunikasi melalui penerapan teknologi telekomunikasi yang memadai;
2. Penambahan dan pembangunan sentral-sentral telepon baru;
3. Perluasan pengadaan telepon umum dan peningkatan pelayanan warung telekomunikasi di kawasan permukiman padat penduduk.

2.2.10 PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS

Pengembangan kawasan prioritas di tingkat Kotamadya diarahkan pada bagian wilayah kota yang memiliki peranan dan fungsi strategis bagi pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan kota, meliputi:

A. Kotamadya Jakarta Pusat

Pengembangan kawasan prioritas di Kota Jakarta Pusat, diarahkan untuk :

1. Kawasan Taman Medan Merdeka sebagai pusat Pemerintahan;
2. Pengembangan Bandar Baru Kemayoran sebagai pusat bisnis berskala nasional dan internasional;
3. Penataan Kawasan Tanah Abang sebagai pusat utama perdagangan dan jasa;
4. Pengembangan Kawasan Terpadu Waduk Melati sebagai kawasan Perdagangan Jasa dan permukiman.

B. Kotamadya Jakarta Utara

Pengembangan kawasan prioritas di Kota Jakarta Utara, diarahkan untuk :

- a. Pengembangan Kawasan Kepulauan Seribu, sebagai pusat pariwisata yang didukung dengan peningkatan kualitas lingkungan dan perhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian cagar budaya;
- b. Pengembangan Kawasan Sunda Kelapa sebagai pusat pariwisata dengan penataan pelabuhan, perbaikan lingkungan dan pemugaran;
- c. Pengembangan kawasan permukiman nelayan Muara Angke sebagai kawasan pariwisata bahari dan tempat kegiatan perikanan laut;
- d. Pelestarian kawasan Hutan Angke Kapuk sebagai kawasan lindung.

C. Kotamadya Jakarta Barat

Pengembangan kawasan prioritas di Kota Jakarta Barat, diarahkan untuk :

1. Pengembangan Kawasan Sentra Primer Baru Barat sebagai pusat Pemerintahan wilayah Kotamadya, Perdagangan dan Jasa;
2. Pengembangan Kawasan Kota Tua Glodok - Pancoran sebagai kawasan bersejarah;
3. Pengembangan Kawasan Sentra Bunga Rawa Belong sebagai pusat pemasaran bunga dan tanaman Has;
4. Pengembangan Kawasan Rawa Buaya sebagai pasar induk bahan pangan yang terpadu dengan terminal penumpang dan stasiun kereta api.

D. Kotamadya Jakarta Selatan

Pengembangan kawasan prioritas di Kota Jakarta Selatan, diarahkan untuk :

1. Pengembangan Kawasan Segitiga Kuningan sebagai pusat kegiatan bisnis Internasional dan pusat kegiatan Diplomatik;
2. Pengembangan Niaga Terpadu Sudirman sebagai kawasan multifungsi bertaraf internasional;
3. Pengembangan stasiun Manggarai sebagai stasiun kereta api utama antar kota yang didukung dengan terminal penumpang;
4. Pengembangan Kawasan Situ Babakan yang merupakan perkampungan Budaya Betawi yang didukung hutan kota yang serasi untuk kawasan wisata budaya;
5. Pengembangan Kawasan Situ Mangga Bolong sebagai lokasi wisata lingkungan,

E. Kotamadya Jakarta Timur

Pengembangan kawasan prioritas di Kota Jakarta Timur, diarahkan untuk :

1. Pengembangan Kawasan Sentra Primer Baru Timur sebagai Pusat Pemerintahan Wilayah Kotamadya, perdagangan dan jasa;
2. Penataan Kawasan Industri Pulogadung dan Cakung sebagai kawasan industri selektif berteknologi tinggi;
3. Pembangunan waduk pada kawasan Halim Perdana Kusuma.

2.3 STATUS RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DI DKI JAKARTA

Penyusunan RTRW Propinsi DKI Jakarta disusun tahun 1998 dan selesai pada tahun 1999. Adapun perda RTRW Propinsi DKI dengan Nomor 6 Tahun 1999.

2.3.1 RTRW KOTA-KOTA JAKARTA

Penyusunan RTRW Kota-kota Jakarta tidak terpisah dari RTRW Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, RTRW kota-kota di Propinsi DKI Jakarta merupakan satu penyusunan dan satu perda dengan RTRW Propinsi DKI Jakarta.

2.3.2 RTRW KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

RTRW Kabupaten Kepulauan Seribu disusun pada tahun 2002 yang merupakan kabupaten baru di Propinsi DKI Jakarta. Sedangkan aspek hukumnya yaitu perda dalam proses pengesahan.

Tabel 2.1 Status RTRW Kota-kota dan Kabupaten di Propinsi DKI

Bentuk Rencana	Disusun Tahun	Selesai Tahun	Status Perda		Permasalahan Daerah (Terkait Pengembangan Wilayah)
			Proses Legalitas	No & Tgl Perda	
RTRW Propinsi	1998	1999	-	6 Th. 1999	-
RTRW Kabupaten					
Kepulauan Seribu	2002	2002	v	-	Kab. Baru
RTRW Kota :					

Bentuk Rencana	Disusun Tahun	Selesai Tahun	Status Perda		Permasalahan Daerah (Terkait Pengembangan Wilayah)
			Proses Legalitas	No & Tgl Perda	
Jakarta Pusat	1999	1999		6 Th. 1999	
Jakarta Barat	1999	1999		6 Th. 1999	
Jakarta Utara	1999	1999		6 Th. 1999	
Jakarta Timur	1999	1999		6 Th. 1999	
Jakarta Selatan	1999	1999		6 Th. 1999	

Catatan :
RTRW Kabupaten Belum Perda = 1 Kabupaten

Untuk meningkatkan pemanfaatan ruang yang optimal perlu memberikan perhatian terhadap potensi wilayah, permasalahan, dan alternatif kebijakan sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan, efisiensi, sinergi dan keserasian sehingga tercapai sinkronisasi program-program pembangunan.

3.1 POTENSI

3.1.1 Letak Strategis

Kawasan ini sebagai simpul transportasi yang meliputi wilayah nasional atau beberapa propinsi dan juga mempunyai fungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lingkungan kota penyangganya Kota Tangerang, Bekasi, Ciputat, Parung, Depok Serpong dan Cileungsi. Kawasan ini secara topografis berupa dataran rendah dengan ketinggian 0 – 100 m diatas permukaan laut. Dilalui 13 sungai yang berperan sebagai saluran drainase dan sumber air baku.

Adanya prasarana perhubungan kelas internasional, yaitu :

1. Bandar Udara, yaitu Soekarno - Hatta, dan Halim Perdana Kusuma; dan
2. Pelabuhan Laut, yaitu Tanjung priok, dan Sunda Kelapa

3.1.2 Ekonomi

A. Investasi

Berkaitan dengan investasi, pada tahun 2001 ada 532 proyek yang disetujui pemerintah DKI, 487 berupa proyek PMA dan 45 PMDN. Dana yang akan ditanamkan melalui proyek tersebut sebesar US\$ 313.475.540 untuk proyek PMA dan Rp. 5.752.926,15 milyar untuk PMDN.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai salah satu indikator dalam peningkatan ekonomi tingkat propinsi di DKI Jakarta adalah nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dengan Minyak dan Gas dan PDRB Per Kapita atau GRDP (Gross Regional Domestic Product) dan GRDP Per Capita atas dasar Harga Berlaku, yaitu : pada tahun 2000 : Rp. 18.908.264,90 M dan Rp.22.614.622.000,- sedangkan pada tahun 2001 : Rp. 220.468.330,94 M dan Rp. 26.333.809.000,-.

3.1.3 Potensi Wilayah

A. Umum

Secara umum potensi wilayah Propinsi DKI Jakarta pada saat ini adalah:

1. Industri;
2. Perikanan;
3. Perdagangan dan jasa;
4. Pariwisata.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menyebutkan bahwa Propinsi DKI Jakarta merupakan sistem perkotaan nasional yaitu : Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota pusat pemerintahan (Ibukota

propinsi), Kota sebagai pintu gerbang nasional (ditandai dengan adanya pelabuhan utama primer/sekunder atau bandara udara primer), Kota-kota pusat kegiatan ekonomi nasional, Kota-kota pusat kawasan tertentu.

B. Kawasan Andalan Prioritas

Kawasan Andalan Jakarta

Sebagai kawasan andalan kawasan ini dikategorikan sebagai kawasan cepat tumbuh, yaitu :

1. Sebagai kawasan budidaya yang mempunyai kegiatan sektor produksi dengan skala besar dan berperan menunjang kegiatan produksi nasional dan ekspor nasional;
2. Sebagai kawasan budidaya yang memberikan efek penggandaan (multiplier effect) tertinggi terhadap kegiatan ekonomi dan sosial lainnya ditingkat nasional dan wilayah sekitarnya; dan
3. Sebagai kawasan yang mempunyai aglomerasi prasarana perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang berperan mendorong pengembangan wilayah.

Kawasan andalan prioritas di Propinsi DKI Jakarta adalah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Adapun Potensi Kawasan Andalan Prioritas ini adalah : Industri, Perikanan, Pariwisata, Perdagangan dan Jasa.

Kawasan tertentu prioritas

Kawasan tertentu prioritas di Propinsi DKI Jakarta yaitu di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan termasuk Kepulauan Seribu. Adapun potensi kawasan

tertentu prioritas adalah : Industri, Perikanan, dan Pariwisata. Lebih lanjut kawasan andalan di DKI Jakarta dapat dilihat pada peta dihalaman berikut)

3.2 PERMASALAHAN

Permasalahan di Propinsi DKI Jakarta pada saat ini adalah :

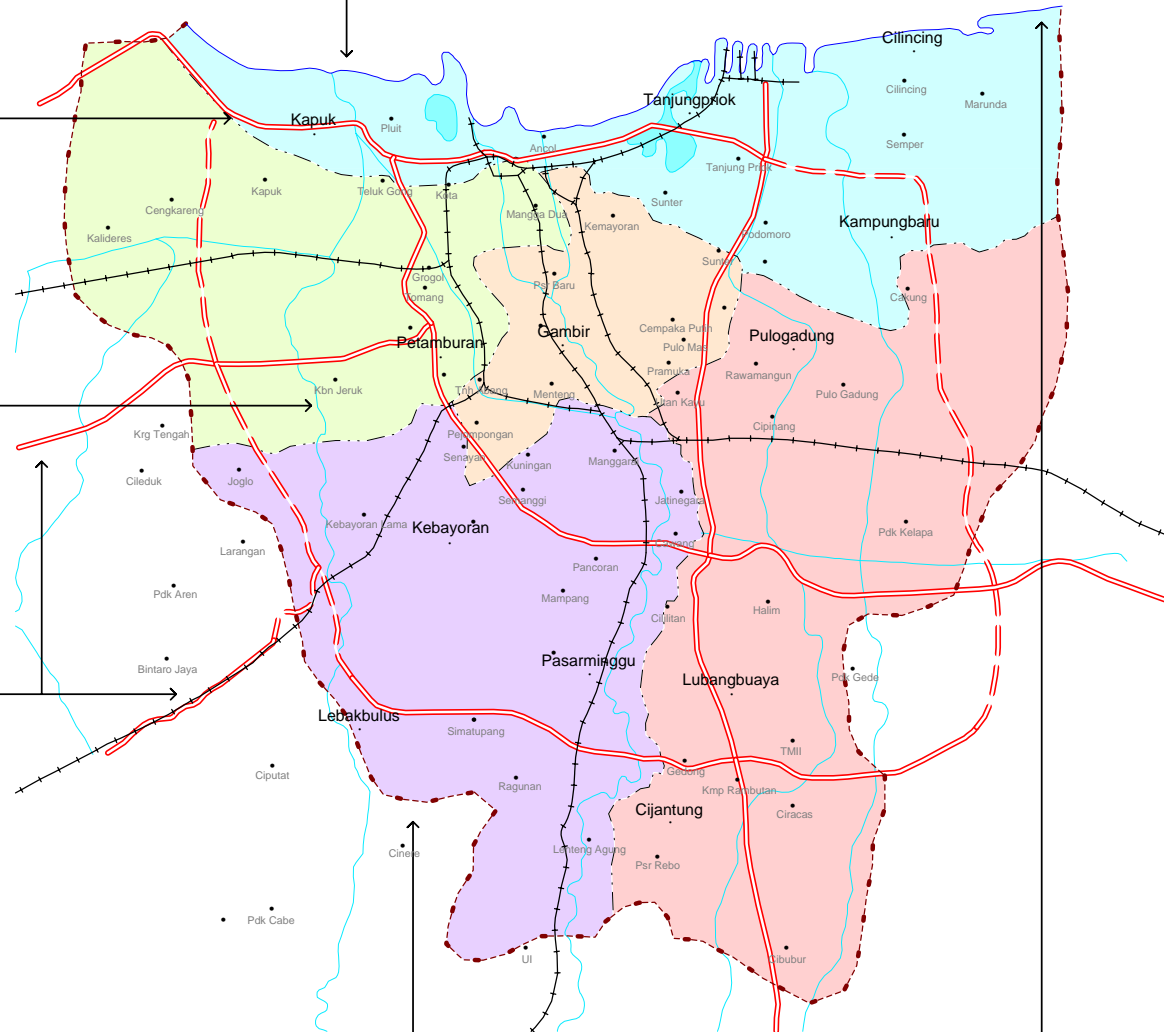
1. Penanggulangan banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya;
2. Penurunan tingkat pelayanan jalan/akses;
3. Tingginya tingkat kemacetan lalu lintas;
4. Tingginya urbanisasi dan peningkatan daerah kumuh dengan kepadatan tinggi;
5. Belum terpenuhinya jaringan distribusi untuk pelayanan air bersih;
6. Struktur kota dan sistem infrastruktur yang belum sinergik;
7. Perkembangan sektor formal & informal yang tidak terkendali yang mengakibatkan perubahan pola pemanfaatan ruang dan daya dukung lingkungan;
8. Besarnya perubahan fungsi guna lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya;
9. Tidak serasinya pengelolaan air pada daerah hulu & hilir di SWS Ciliwung – Cisadane;
10. Kondisi prasarana & sarana lingkungan perumahan & permukiman yang kurang memadai;
11. Kondisi perumahan nelayan yang relatif kumuh;
12. Konflik pemanfaatan lahan sebagai akibat tidak konsisten penataan ruang (lebih lanjut masalah penataan ruang ini dapat dilihat pada peta berikut ini)

PETA MASALAH TATA RUANG PROPINSI DKI JAKARTA



Legenda :

- Jakarta Utara
- Jakarta Barat
- Jakarta Pusat
- Jakarta Timur
- Jakarta Selatan
- Jalan Tol
- Rencana jalan tol
- Jalan arteri
- Jalan kolektor 1
- Jalan kolektor 2
- Jalan kolektor 3
- Rel KA
- Batas propinsi
- Batas kota
- Sungai



Hutan Lindung di Kawasan Kapuk Naga yang terdesak oleh perkembangan fisik dan perlu untuk segera ditangani

Jalan tol sedyatmo yang selalu rendam banjir di musim hujan

masih banyaknya daerah genangan banjir yang hampir selalu terendam di saat musim penghujan

Pesatnya pertumbuhan permukiman di sekeliling wilayah DKI menyebabkan padatnya arus lalu lintas di semua jalan akses menuju pusat kota

Adanya ketidaksinkronan peraturan pemanfaatan ruang pada kawasan resapan air di DKI Jakarta dgn Kabupaten/kota di sekelilingnya

Pantai Cilincing yang mengalami abrasi serius dan perlu penanganan

Peta Dasar	Peta Repprofit 1:250.000, Bakosurtanal
Tema	Hasil rapat Konreg 2003
Nama File	Peta Masalah Tata Ruang DKI.WCR

3.2.1 Alternatif Kebijakan Pemerintah

Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan di Propinsi DKI Jakarta sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintah khususnya bidang permukiman dan prasarana wilayah baik yang program yang telah dilakukan maupun program yang akan dilaksanakan.

3.2.2 Kebijakan untuk Bidang Penataan Ruang

Kebijakan penataan ruang di Propinsi DKI lebih bersifat memfasilitasi terhadap penataan ruang. Adapun rencana kegiatan program APBN tahun 2003 yaitu :

- ✓ Penyusunan Amdal Regional untuk pembangunan skala besar;
- ✓ Pembuatan Model Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Situ;
- ✓ Penyusunan RTR DAS di kawasan Jabodetabek (bagian barat);
- ✓ Penyusunan RTR DAS di kawasan Jabodetabek (bagian tengah);
- ✓ Penyusunan RTR DAS di kawasan Jabodetabek (bagian timur);
- ✓ Bantek pemaduserasian Taru dan program pembangunan antar sektor dan wilayah;
- ✓ Penataan ulang pola pemanfaatan ruang di damija dalam rangka pengamanan Jl. Nasional dalam kawasan perkotaan;
- ✓ Pengendalian pemanfaatan kawasan Kapuk Naga yang berbasis peran serta masyarakat dan pelaku usaha;

3.2.3 Bidang Prasarana Wilayah

Program yang diperlukan untuk bidang prasarana wilayah di Propinsi DKI Jakarta, yaitu :

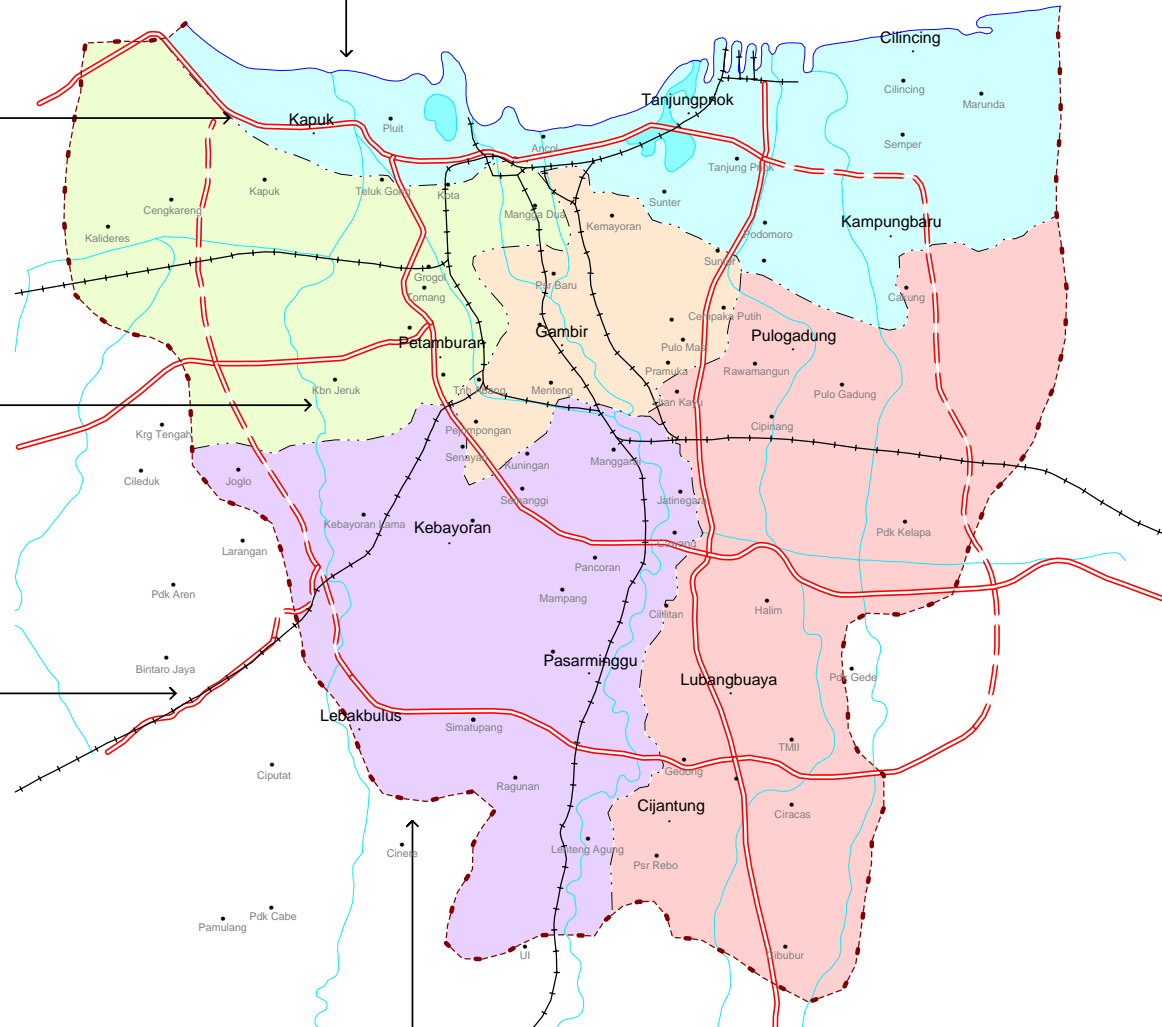
1. Pembangunan JORR & Kalimalang (jaringan tol dlm kota); dan
2. Peningkatan Jaringan Jalan Nasional.

PETA PROGRAM TATA RUANG PROPINSI DKI JAKARTA



Legenda :

- Jakarta Utara
- Jakarta Barat
- Jakarta Pusat
- Jakarta Timur
- Jakarta Selatan
- Jalan Tol
- Rencana jalan tol
- Jalan arteri
- Jalan kolektor 1
- Jalan kolektor 2
- Jalan kolektor 3
- Rel KA
- Batas provinsi
- Batas kota
- Sungai



Upaya pengendalian pemanfaatan Kawasan Kapuk Naga yang berbasis peranserta masyarakat dan pelaku usaha

Pengembalian fungsi rawa-rawa sebagai tandon air di kala laut pasang atau musim penghujan

Pengkajian kelayakan pembangunan rumah susun di kawasan yang selama ini selalu tergenang banjir

Pemaduserasian rencana pemanfaatan ruang antara DKI Jakarta dengan kabupaten dan kota di sekitarnya

Pemaduserasian peraturan pengendalian pemanfaatan ruang antara DKI Jakarta dengan kabupaten dan kota di sekitarnya

Peta Dasar	Peta Repproort 1:250.000, Bakosurtanal
Tema	Hasil rapat Konreg 2003
Nama File	Peta Program Tata Ruang DKI.WOR

3.2.4 Bidang Perkotaan & Perdesaan

Program yang diperlukan untuk bidang perkotaan dan perdesaan untuk tahun 2003 di Propinsi DKI Jakarta, adalah :

1. Pemeliharaan/ peningkatan & pembangunan Jalan/jembatan Jabotabek;
2. Program prasarana lingkungan kota;
3. Program peningkatan Prasarana & sarana permukiman (air bersih).

3.2.5 Bidang Perumahan & Permukiman

Program yang terkait dengan bidang permukiman dan prasarana wilayah untuk tahun 2001 yang perlu dilakukan untuk Propinsi DKI Jakarta adalah :

1. Pengembangan sarana & prasarana permukiman;
2. Penataan Kawasan.

3.2.6 Bidang Sumberdaya Air

Program yang terkait dengan bidang permukiman dan prasarana wilayah untuk tahun 2001 yang perlu dilakukan untuk bidang sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta adalah :

1. Perbaikan, peningkatan & pembangunan sarana Pengendalian banjir.
2. Perbaikan sarana & prasarana konservasi SDA

PETA KEGIATAN BANTEK DI PROPINSI DKI JAKARTA



Legenda :

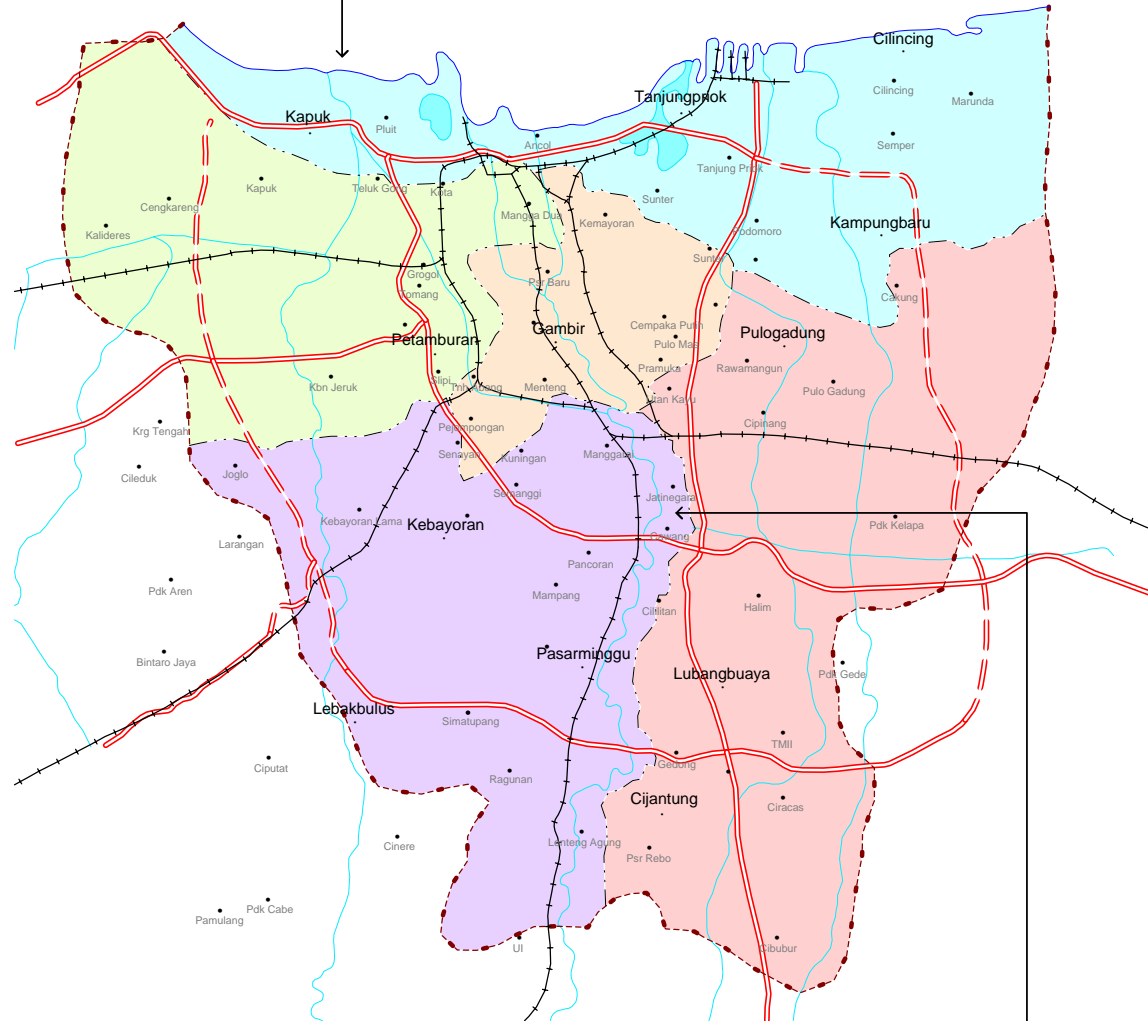
- Jakarta Utara
- Jakarta Barat
- Jakarta Pusat
- Jakarta Timur
- Jakarta Selatan
- Jalan Tol
- Rencana jalan tol
- Jalan arteri
- Jalan kolektor 1
- Jalan kolektor 2
- Jalan kolektor 3
- Rel KA
- Batas propinsi
- Batas kota
- Sungai

Peta Dasar	Peta Repprofit 1:250.000, Bakosurtanal
Tema	Hasil rapat Korreg 2003
Nama File	Peta Bantek dan Birek DKI.WOR



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH TENGAH

Kajian Pemanfaatan Ruang Per
mukiman Skala Besar di Jabode
tabek : Kasus kapuk, Cengk
reng dan Muara Kamal



Penyiapan Model Pengendalian
Pemanfaatan Ruang, kasus
Bidara Cina

LAMPIRAN I

Data Penataan Ruang Tahun 1995

A. Data Umum

No	Nama Kabupaten/Kot	Luas (Ha)	Jml Penduduk (Jiwa)	Kelahiran (Jiwa)	Kematian (Jiwa)	Jml Rumah (Unit)	Jml Rmh Kumuh (Unit)
1	Jakarta Pusat	47929	1117851	0	4147	222482	34426
2	Jakarta Barat	126236	1465144	0	3565	348695	28466
3	Jakarta Utara	152131	1176184	0	3858	173838	30246
4	Jakarta Selatan	145536	2099751	0	5484	331855	19727
5	Jakarta Timur	471832	5858930	0	17054	1076870	112865
	Jumlah	943664	11717860	0	34108	2153740	225730

Sumber : Biro Pusat Statistik

B. Struktur Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No	Nama Kabupaten/Kota	Pertanian (Orang)	Pertambangan (Orang)	Industri (Orang)	Listrik (Orang)	Bangunan (Orang)	Perdagangan (Orang)	Angkutan (Orang)	Keuangan (Orang)	Jasa (Orang)	Lain (Orang)	Rmh Tangga (Orang)
1	Jakarta Pusat	45	156	10868	2326	17107	82998	11578	11176	65211	32229	233694
2	Jakarta Barat	7833	94	101405	2518	23707	126219	19685	7560	119926	27949	436896
3	Jakarta Utara	7878	250	112273	4844	40814	209217	31263	18736	185137	60178	670590
4	Jakarta Selatan	32491	5542	257620	10619	96430	484170	79022	46027	441028	156233	1609182
5	Jakarta Timur	62523	11084	515214	21226	192812	968129	158017	92053	881554	312238	3214850
	Jumlah	110770	17126	997380	41533	370870	1870733	299565	175552	1692856	588827	6165212

Sumber : Biro Pusat Statistik

C. Luas Lahan Sawah

No	Nama Kabupaten/Kota	Sawah Teknis (Ha)	Sawah Setengah Teknis (Ha)	Sawah Sederhana PU (Ha)	Sawah Sederhana Non PU (Ha)	Sawah Tadah Hujan (Ha)	Sawah Pasang Surut (Ha)
1	Jakarta Pusat	0	0	0	0	0	0
2	Jakarta Barat	0	3984	0	284	510	0
3	Jakarta Utara	0	4802	3500	1000	5272	0
4	Jakarta Selatan	0	0	0	0	0	10
5	Jakarta Timur	0	13588	7000	2284	11054	10
	Jumlah	0	22374	10500	3568	16836	20

Sumber : Biro Pusat Statistik

D. Fasilitas Pendidikan

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah TK (Unit)	Jumlah SD (Unit)	Jumlah SMP (Unit)	Jumlah SMA (Unit)	Jumlah PT (Unit)
1	Jakarta Pusat	230	556	205	150	25
2	Jakarta Barat	288	736	233	175	12
3	Jakarta Utara	187	487	194	118	10
4	Jakarta Selatan	366	955	308	230	61
5	Jakarta Timur	1071	2734	940	673	108
	Jumlah	2142	5468	1880	1346	216

Sumber : Biro Pusat Statistik

E. Fasilitas Peribadatan

No	Nama Kabupaten/Kota	Masjid (Unit)	Surau (Unit)	Gereja (Unit)	Kapel (Unit)	Pura (Unit)	Vihara (Unit)
1	Jakarta Pusat	371	667	132	0	3	46
2	Jakarta Barat	466	1331	137	0	3	68
3	Jakarta Utara	377	1103	132	14	9	15
4	Jakarta Selatan	517	1292	67	0	2	4
5	Jakarta Timur	609	1569	141	0	6	9
	Jumlah	2340	5962	609	14	23	142

Sumber : Biro Pusat Statistik

F. Fasilitas Kesehatan

No	Nama Kabupaten/Kota	Rumah Sakit (Unit)	Bkian (Unit)	RS Bersalin (Unit)	Poliklinik (Unit)	Puskesmas (Unit)	Balai Pengobatan (Unit)	Praktek Dokter (Buah)	Dokter (Orang)	Paramedis (Orang)	Bidan (Orang)	Dukun (Orang)
1	Jakarta Pusat	12	37	41	44	60	27	183	429	265	121	205
2	Jakarta Barat	14	47	64	70	59	36	385	576	390	209	114
3	Jakarta Utara	11	33	38	40	43	22	149	343	188	76	144
4	Jakarta Selatan	49	154	183	197	218	111	884	1732	1101	526	668
5	Jakarta Timur	97	304	364	391	427	222	1750	3423	2146	1011	1283
	Jumlah	183	575	690	742	807	418	3351	6503	4090	1943	2414

Sumber : Biro Pusat Statistik

G. Fasilitas Perekonomian

No	Nama Kabupaten/Kota	Pasar Permanen (Unit)	Pasar Non Permanen (Unit)	Pasar Hewan (Unit)	TPI (Unit)	Pasar Ikan (Unit)	Restoran (Unit)	Hotel (Unit)	Koperasi Unit Desa (Unit)	Non Koperasi Unit Desa (Unit)
1	Jakarta Pusat	39	23	2	0	0	623	111	0	135
2	Jakarta Barat	32	49	0	0	0	583	34	3	106
3	Jakarta Utara	33	17	0	3	4	432	38	5	67
4	Jakarta Selatan	30	27	0	0	0	508	21	1	311
5	Jakarta Timur	52	33	1	0	0	596	34	2	163
	Jumlah	186	149	3	3	4	2742	238	11	782

Sumber : Biro Pusat Statistik

H. Indikasi Kesejahteraan Masyarakat

No	Nama Kabupaten/Kota	Pelanggan PLN (Rumah Tangga)	Pelanggan Non PLN (Rumah Tangga)	Jumlah Mobil (Unit)	Jumlah Motor (Unit)
1	Jakarta Pusat	217852	13853	54611	84244
2	Jakarta Barat	419929	12665	84058	144370
3	Jakarta Utara	231423	17051	22666	58510
4	Jakarta Selatan	420853	0	118926	158041
5	Jakarta Timur	438674	10679	85995	133847
	Jumlah	1728731	54248	366256	579012

Sumber : Biro Pusat Statistik

LAMPIRAN II

Data Penataan Ruang Tahun 2003

A. Tabel Kependudukan

No	Nama Kabupaten	Jumlah Lelaki	Jumlah Perempuan	Jumlah Keluarga	Prosentase Keluarga Pertanian	Keluarga Prasejahtera	Jumlah Penganggur
1	Kab. Kepulauan Seribu	9426	9016	5027	525	1181	82
2	Kota Jakarta Selatan	868051	804757	349046	94	19005	26226
3	Kota Jakarta Timur	1088772	975048	409324	40	54452	82636
4	Kota Jakarta Pusat	452817	449334	213993	0	33679	49596
5	Kota Jakarta Barat	792253	775692	269465	88	28560	15403
6	Kota Jakarta Utara	590092	559640	255579	139	86636	63252
JUMLAH		3801411	3573487	1502434	886	223513	237195

Sumber : Biro Pusat Statistik

B. Tabel Tingkat Kesejahteraan

No	Nama Kabupaten	Pelanggan PLN	Pelanggan Listrik Non PLN
1	Kab. Kepulauan Seribu	0	4834
2	Kota Jakarta Selatan	343350	2
3	Kota Jakarta Timur	408714	1
4	Kota Jakarta Pusat	208576	2
5	Kota Jakarta Barat	258202	4
6	Kota Jakarta Utara	255559	0
JUMLAH		1474401	4843

Sumber : Biro Pusat Statistik

C. Tabel Perumahan Di Kawasan Rawan Bencana

No	Nama Kabupaten	Jumlah Bangunan Permanen	Jumlah Bukan Permanen	Jumlah Keluarga di Bantaran	Jumlah Bangunan Rumah di Bantaran	Jumlah Lokasi Rumah Kumuh	Luas Rumah Kumuh	Jumlah Bangunan Rumah Kumuh	Jumlah Keluarga Permukiman Kumuh	Jumlah Keluarga di Rawan Bencana Tanah Longsor	Jumlah Keluarga di Rawan Bencana Banjir	Jumlah Keluarga di Rawan Bencana Lainnya	Jumlah Keluarga di Kawasan Hutan Lindung	Luas Lahan Kritis	Jumlah Keluarga di Lahan Kritis
1	Kab. Kepulauan Seribu	1373	2056	0	0	0	0	0	0	0	0	2309	0	0	0
2	Kota Jakarta Selatan	207325	101580	6155	3660	73	902	11556	18607	0	11838	2225	2019	0	0
3	Kota Jakarta Timur	239063	153226	6445	7988	564	618	18582	21043	0	8794	0	12	0	0
4	Kota Jakarta Pusat	88088	68510	863	681	483	630	27968	52798	0	5224	2730	0	0	0
5	Kota Jakarta Barat	206772	106202	2564	1679	269	959	32688	55828	0	1359	60	0	0	0
6	Kota Jakarta Utara	130899	75137	2766	2123	112	842	24433	35103	0	9657	2650	0	0	0
JUMLAH		873520	506711	18793	16131	1501	3951	115227	183379	0	36872	9974	2031	0	0

Sumber : Biro Pusat Statistik

D. Tabel Fasilitas Pendidikan

No	Nama Kabupaten	Jumlah TK	Jumlah SD	Jumlah SLTP	Jumlah SLTA	Jumlah SMK	Jumlah Perguruan Tinggi	Jumlah SLB	Jumlah Pesantren Swasta	Jumlah Seminari Swasta
1	Kab. Kepulauan Seribu	8	15	6	1	1	0	0	6	0
2	Kota Jakarta Selatan	418	864	270	169	59	59	19	67	3
3	Kota Jakarta Timur	506	1053	312	263	39	54	16	28	4
4	Kota Jakarta Pusat	204	489	155	116	25	39	4	6	0
5	Kota Jakarta Barat	333	688	215	148	12	17	0	24	6
6	Kota Jakarta Utara	224	479	190	101	17	10	1	20	2
JUMLAH		1693	3588	1148	798	153	179	40	151	15

Sumber : Biro Pusat Statistik

E. Tabel Fasilitas Kesehatan

No	Nama Kabupaten	Jumlah RS	Jumlah RSB	Jumlah Bidan	Jumlah Poliklinik	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu	Jumlah Praktek Dokter	Jumlah Praktek Bidan	Jumlah Posyandu	Jumlah Polindes	Jumlah Apotik	Jumlah POD	Jumlah Toko Obat	Jumlah Dokter Pria	Jumlah Dokter Wanita
1	Kab. Kepulauan Seribu	0	0	8	0	6	4	0	6	19	0	0	0	1	0	0
2	Kota Jakarta Selatan	28	99	229	129	52	44	538	200	991	11	154	11	182	590	291
3	Kota Jakarta Timur	30	79	393	186	74	19	619	281	848	11	175	4	128	476	398
4	Kota Jakarta Pusat	16	45	72	94	43	11	477	107	450	9	114	18	45	269	133
5	Kota Jakarta Barat	11	54	155	142	67	13	578	187	509	6	159	2	132	320	140
6	Kota Jakarta Utara	17	55	158	107	58	18	439	115	363	10	77	8	58	334	233
JUMLAH		102	332	1015	658	300	109	2651	896	3180	47	679	43	546	1989	1195

Sumber : Biro Pusat Statistik

F. Tabel Fasilitas Peribadatan

No	Nama Kabupaten	Masjid	Surau	Gereja Kristen	Gereja Katholik	Pura	Vihara	Klenteng
1	Kab. Kepulauan Seribu	13	42	0	0	0	0	0
2	Kota Jakarta Selatan	665	1299	55	17	4	4	1
3	Kota Jakarta Timur	800	1701	132	26	11	9	4
4	Kota Jakarta Pusat	390	530	111	24	2	23	13
5	Kota Jakarta Barat	538	1438	128	55	2	35	34
6	Kota Jakarta Utara	401	926	129	34	14	28	14
JUMLAH		2807	5936	555	156	33	99	66

Sumber : Biro Pusat Statistik

G. Tabel Penggunaan Lahan

No	Nama Kabupaten	Luas Desa	Luas lahan Sawah	Luas Lahan Sawah Berpengairan Diusahakan	Luas Lahan Sawah Tidak Berpengairan Diusahakan	Luas Lahan Sawah Sementara Tidak diusahakan	Luas Lahan Bukan Sawah	Ladang	Perkebunan	Hutan Rakyat	Perumahan	Lahan Bangunan Industri	Lahan Bangunan Lainnya	Lainnya	Lahan Bukan Sawah Sementara Tidak Diusahakan
1	Kab. Kepulauan Seribu	907	0	0	0	0	907	190	0	0	232	301	49	75	59
2	Kota Jakarta Selatan	14356	1	0	0	1	14355	605	0	0	9929	80	1337	1877	533
3	Kota Jakarta Timur	18627	421	70	199	153	18206	68	0	14	13967	914	1690	1193	374
4	Kota Jakarta Pusat	4497	0	0	0	0	4497	0	0	0	2698	120	1092	499	94
5	Kota Jakarta Barat	12531	206	1	187	17	12326	666	0	204	8582	508	1294	656	418
6	Kota Jakarta Utara	13679	709	646	0	63	12970	186	0	0	6260	2100	1733	1741	954
JUMLAH		64597	1337	717	386	234	63261	1715	0	218	41668	4023	7195	6041	2432

Sumber : Biro Pusat Statistik

H. Tabel Konversi Penggunaan Lahan

No	Nama Kabupaten	Sawah Jadi Pertanian	Sawah Jadi Perumahan	Sawah Jadi Industri	Sawah Jadi Perkantoran	Sawah Jadi Lainnya	Tegalan Jadi Sawah	Tegalan Jadi Perumahan	Tegalan Jadi Industri	Tegalan Jadi Pekantoran	Tegalan Jadi Lainnya	Tambak Jadi Sawah
1	Kab. Kepulauan Seribu	0	5	0	1	0	58	9	59	20	2	0
2	Kota Jakarta Selatan	0	0	0	20	20	0	10	0	0	4	0
3	Kota Jakarta Timur	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	Kota Jakarta Pusat	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kota Jakarta Barat	0	15	0	3	0	3	1	0	12	0	0
6	Kota Jakarta Utara	3	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		8	20	0	36	20	61	21	59	32	6	0

Sumber : Biro Pusat Statistik

Lanjutan

No	Nama Kabupaten	Tambak Jadi Perumahan	Tambak Jadi Industri	Tambak Jadi Perkantoran	Tambak Jadi Lainnya	Hutan Jadi Sawah	Hutan Jadi Perumahan	Hutan Jadi Industri	Hutan Jadi Perkantoran	Hutan Jadi Pertanian	Hutan Jadi Lainnya
1	Kab. Kepulauan Seribu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kota Jakarta Selatan	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kota Jakarta Timur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kota Jakarta Pusat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kota Jakarta Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kota Jakarta Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Biro Pusat Statistik

I. Tabel Fasilitas Lainnya

No	Nama Kabupaten	Hotel	Bank_Umum	BPR	Jumlah Kantor Pos
1	Kab. Kepulauan Seribu	4	0	0	0
2	Kota Jakarta Selatan	41	0	0	0
3	Kota Jakarta Timur	45	0	0	0
4	Kota Jakarta Pusat	144	0	0	0
5	Kota Jakarta Barat	50	0	0	0
6	Kota Jakarta Utara	29	0	0	0
Jumlah		313	0	0	0

Sumber : Biro Pusat Statistik